



LAPORAN KINERJA

PUSDIKLATBANGPROF

2023



KEMENTERIAN SOSIAL RI
PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PENGEMBANGAN PROFESI

#KEMENSOS
Hadis

**PUSAT PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PROFESI
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

KEMENTERIAN SOSIAL RI

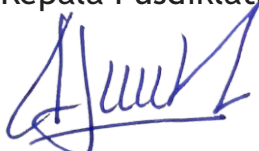
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Sosial Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang berdaya guna, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya

Laporan Kinerja Pusdiklatbangprof merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Pusdiklatbangprof. Laporan ini menyajikan gambaran komprehensif tentang pencapaian kinerja Pusdiklatbangprof sepanjang tahun 2023, termasuk kontribusinya terhadap kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan.

Kami telah berupaya menyusun LAKIN ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga LAKIN ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja Pusdiklatbangprof di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Pusdiklatbangprof



Afrizon Tanjung



Afrizon Tanjung
(Kapusdiklatbangprof)

PERJANJIAN KINERJA KAPUSDIKLATBANGPROF 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	80,43%
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	82%	95,40%
	Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya	82%	82,83%
	Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	85%	90,31%
Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan	100%	100%
Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	80%	82,45%
Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	76,18%
	Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	80%	82,52%
Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof	80	80,03
	Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof	91	90,33
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof	90	92,11



1

Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

Target 73%

Realisasi 80.43%

2

Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi

Target 82%

Realisasi 95.40%

Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya

Target 82%

Realisasi 82.83%

Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik

Target 85%

Realisasi 90.31%



3

Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan

Target 100%

Realisasi 100%

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial

4

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial

Target 80%

Realisasi 82.45%

5

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya

Target 60%

Realisasi 76.18%

Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya

Target 80%

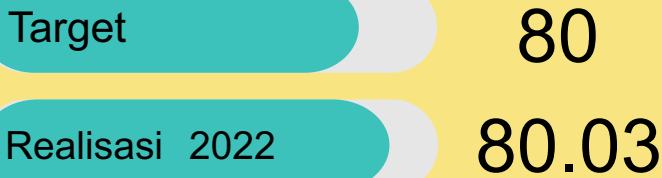
Realisasi 82.52%



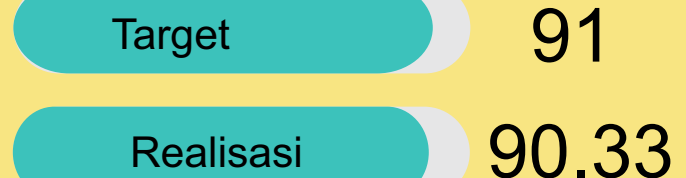
6

Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof



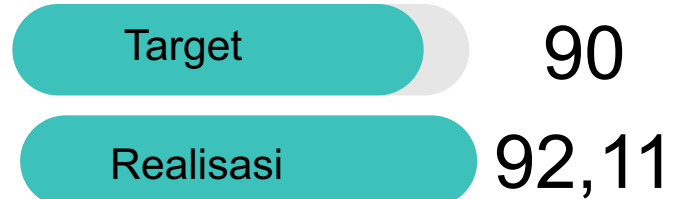
Nilai Kinerja Anggaran Pusdiklatbangprof



7

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof



Kinerja keuangan Pusdiklatbangprof tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 37.798.614.375,- atau 99,32% dari total pagu anggaran sebesar Rp 38.057.093.000,-. Capaian kinerja Pusdiklatbangprof diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Ringkasan Eksekutif	iii
	Daftar Isi	vi
01	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	2
	Tugas dan Fungsi	3
	Struktur Organisasi	4
	Sumber Daya Manusia	5
	Isu Strategis Organisasi	7
	Sistematika Laporan	8
02	Perencanaan Kinerja	9
	Rencana Strategis Pusdiklatbangprof	10
	Revisi Perjanjian Kinerja Pusdiklrbangprof Tahun 2022	12
	Perubahan Pagu Anggaran Pusdiklatbangprof Tahun 2023	13
03	Akuntabilitas Kinerja	14
	Capaian Kinerja 2023	15
	Analisis Indikator Kinerja	16
	Realisasi Anggaran	52
	Analisis Efisiensi	53
04	Penutup	55
	Kesimpulan	56
	Rekomendasi	57

01 PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga, oleh karenanya LKj menjadi salah satu komponen pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian maupun kontribusinya pada upaya mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi tersebut. Laporan Kinerja Pusdiklatbangprof Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Pusdiklatbangprof Tahun 2023, dengan sasaran strategik utama Pusdiklatbangprof adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial sekaligus mendukung Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Sosial dan juga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Pusdiklatbangprof wajib berkontribusi mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Sosial terutama terkait Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstreme Nasional melalui koordinasi kegiatan dengan antar Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung. Pusdiklat mengemban tugas dan fungsi Pusdiklatbangprof sesuai dengan Permensos No 2 tahun 2021 sekaligus komitmen mendukung program Kementerian Sosial RI yang terdapat tuisi tambahan menurut Kepmensos no 221 tahun 2022.

Tugas dan Fungsi Pusdiklatbangprof 2023

Tugas dan fungsi Pusdiklatbangprof menurut Permensos No 2 tahun 2021

1. Kebijakan teknis dukungan substantif di Bidang diklat dan pengembangan profesi
2. Pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang diklat dan pengembangan profesi
3. Pelaksanaan penyuluhan sosial
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha pusat

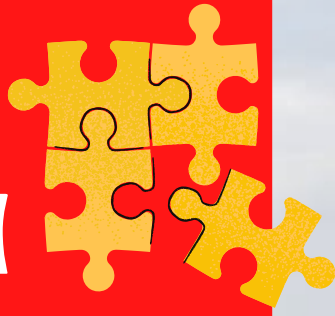


Tugas dan fungsi Pusdiklatbangprof tambahan menurut Kepmensos no 221 tahun 2022

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Manajemen Kasus
5. Sertifikasi
6. Akreditasi
7. Sentra Kreasi Atensi

“Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan”

TUGAS & FUNGSI



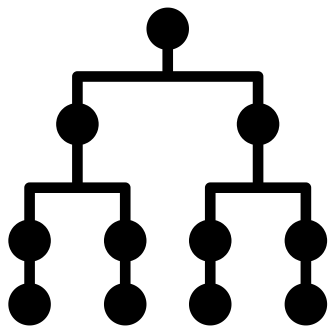
FUNGSI

1. Kebijakan teknis dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
3. Pelaksanaan penyuluhan sosial;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat

TUGAS

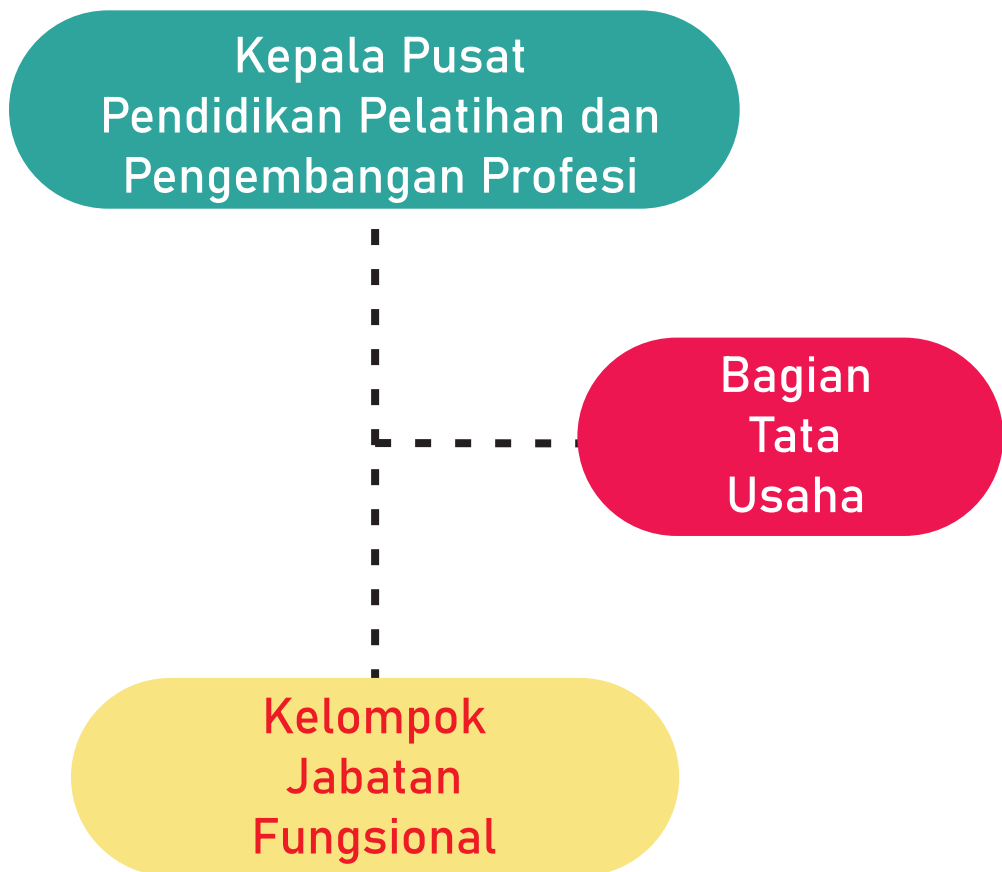
Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi



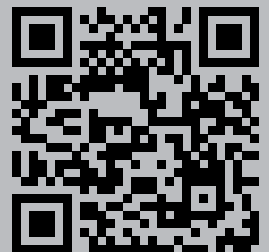


Struktur Organisasi

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi



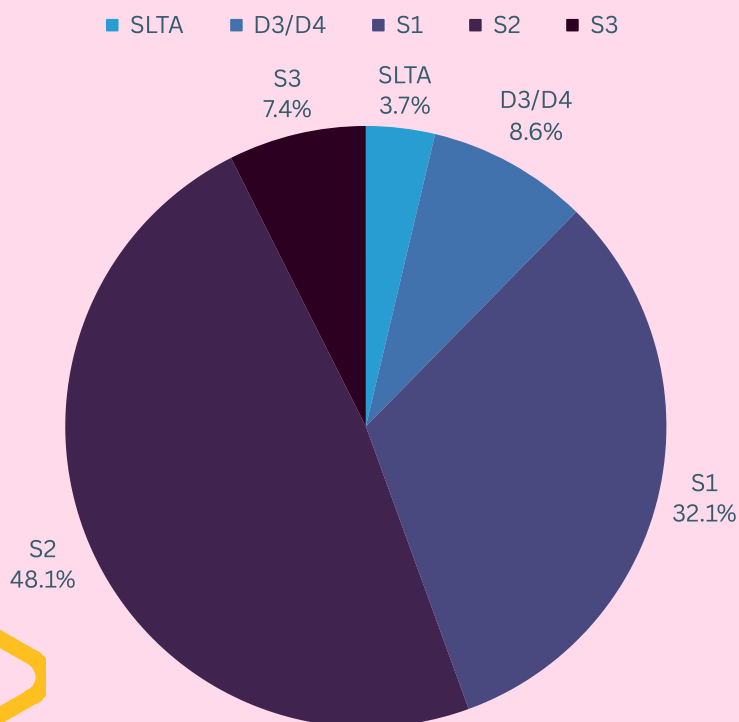
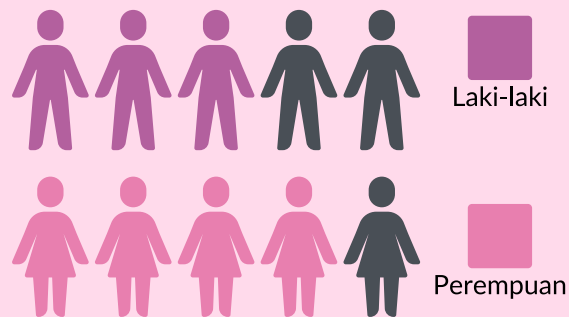
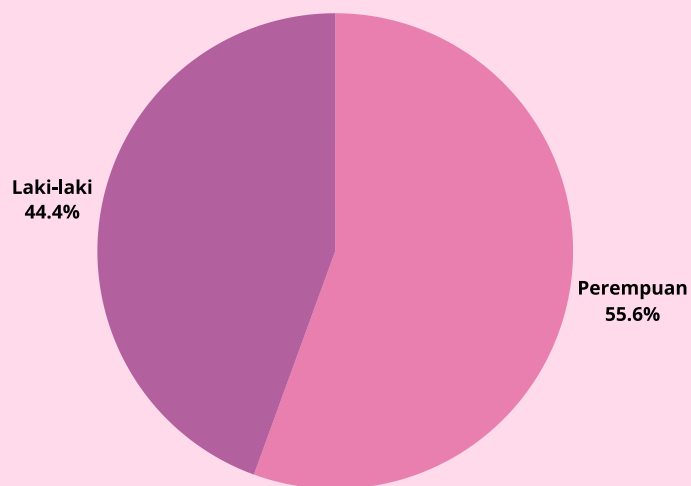
Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2022
tentang Organisasi dan
Tata Kerja
Kementerian Sosial



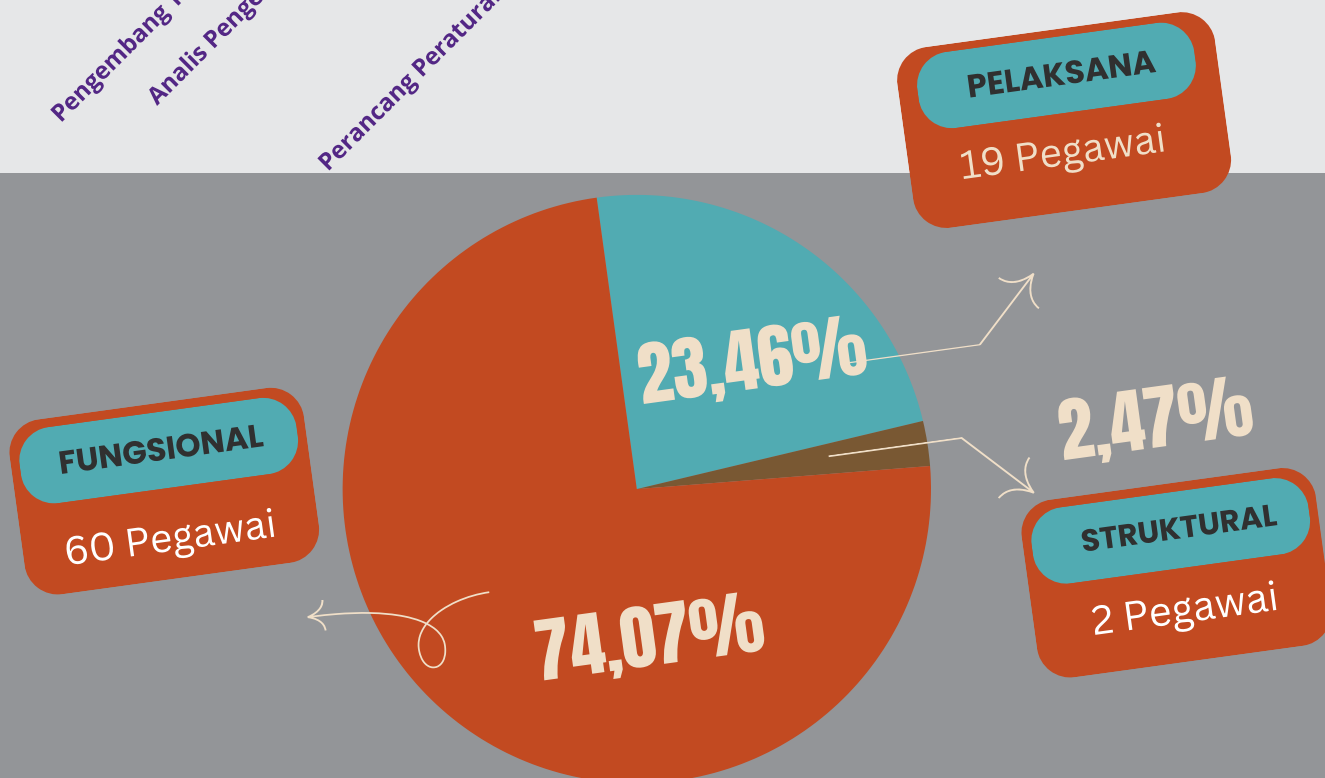
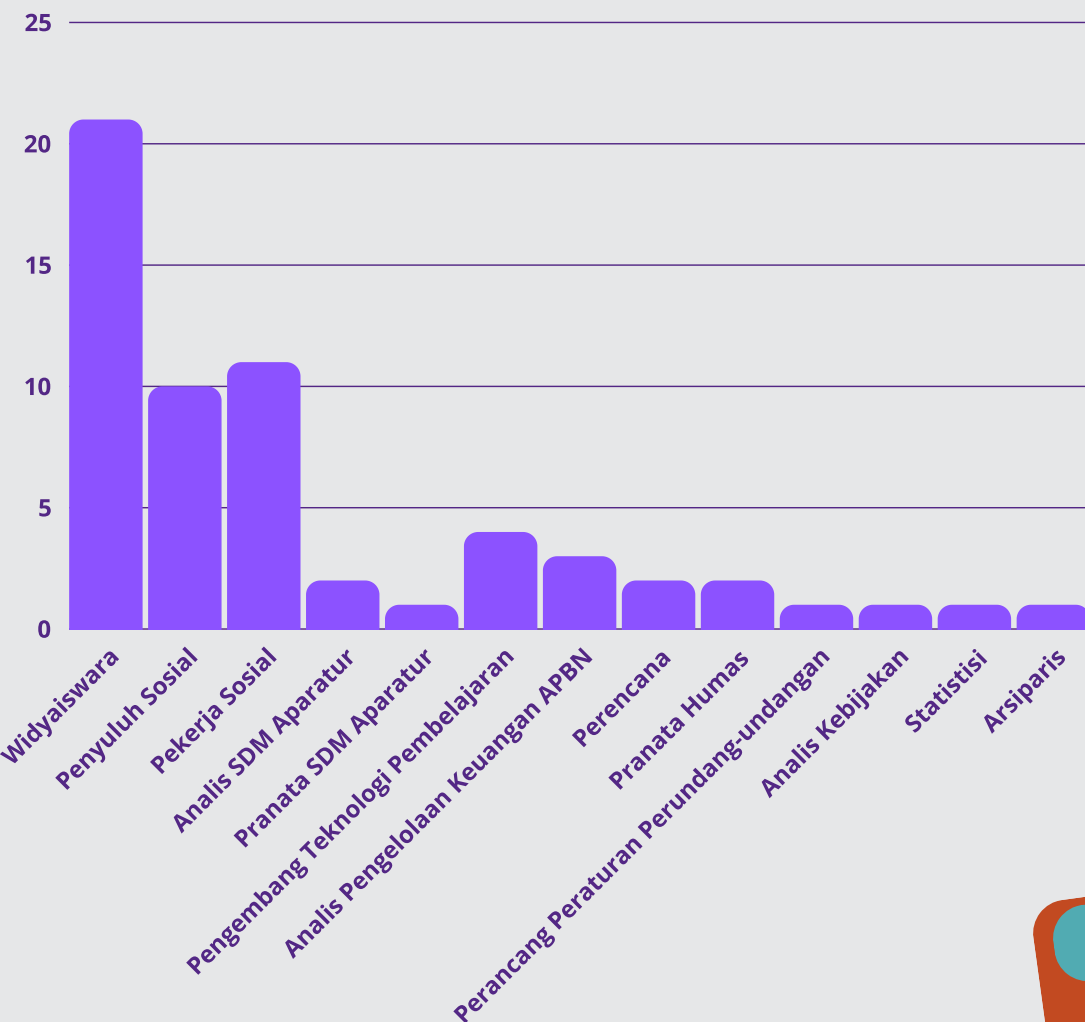
Sumber Daya Manusia



Sumber Daya Manusia (SDM)
di Pusdiklatbangprof tahun 2023
berjumlah 81 pegawai



Sumber Daya Manusia

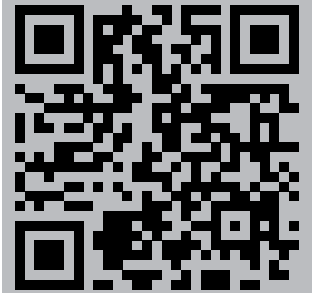


Permasalahan Strategis dan Kebijakan

01 8 (delapan) Fungsi Utama Pusdiklatbangprof



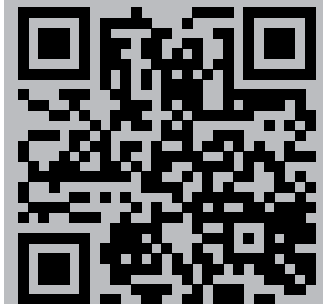
Dokumen Renstra Pusdiklatbangprof 2020-2024 menyebutkan adanya Penambahan fungsi Pusdiklatbangprof dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan sosial kepada masyarakat melalui 8 (delapan) komponen utama/prioritas yang menjadi target dan sasaran Pusdiklatbangprof tahun 2022-2024 yaitu 1) Pelatihan Teknis Kesejahteraan Sosial, 2) Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial, 3) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, 4) Pengembangan Kompetensi SDM Penyuluh Sosial, 5) Pengembangan Kompetensi SDM Pekerja Sosial, 6) Sentra Layanan Sosial, 7) Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan 8) Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial



Renstra
Pusdiklatbangprof
2020-2024

02 Penambahan Fungsi Pusdiklatbangprof

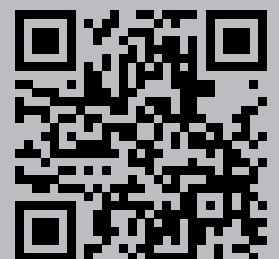
Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada BBPPKS, Poltekesos dan Pusdiklatbangprof mengamanatkan Pusdiklatbangprof turut serta melaksanakan Program Perlindungan Sosial dan Dukungan Manajemen Pusdiklatbangprof turut mendukung tugas dan fungsi unit Teknis. Peningkatan kapasitas tidak dilaksanakan di unit teknis, tetapi diintegrasikan di lembaga tersebut dengan sasaran ASN dan Non ASN termasuk masyarakat. Pusdiklatbangprof melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan Diklat untuk masyarakat sifatnya mandatory. Pelatihan yang dilaksanakan Kemensos bukan berbasis kurikulum melainkan langsung berdasarkan permasalahan di lapangan dengan fokus pada penyelenggaraan life skill training bagi para penerima manfaat



Kepmensos No
221/HUK/2022

03 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pusdiklatbangprof BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung

Permensos No 2 tahun 2022 tentang menyatakan BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kapusdiklatbangprof



Permensos No 2
Tahun 2022

Tugas dan fungsi Pusdiklatbangprof yaitu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Pusdiklatbangprof dan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pusdiklatbangprof.





SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pusdiklatbangprof mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial

01

PENDAHULUAN

berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi

02

PERENCANAAN KINERJA

menyajikan rencana strategis tahun 2020-2024 berdasarkan hasil review dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pelatihan dan

03

AKUNTABILITAS KINERJA

memuat berbagai antara lain pengukuran kinerja, Analisa capaian kinerja, Capaian Lainnya, Realisasi keuangan, Analisis Efisiensi

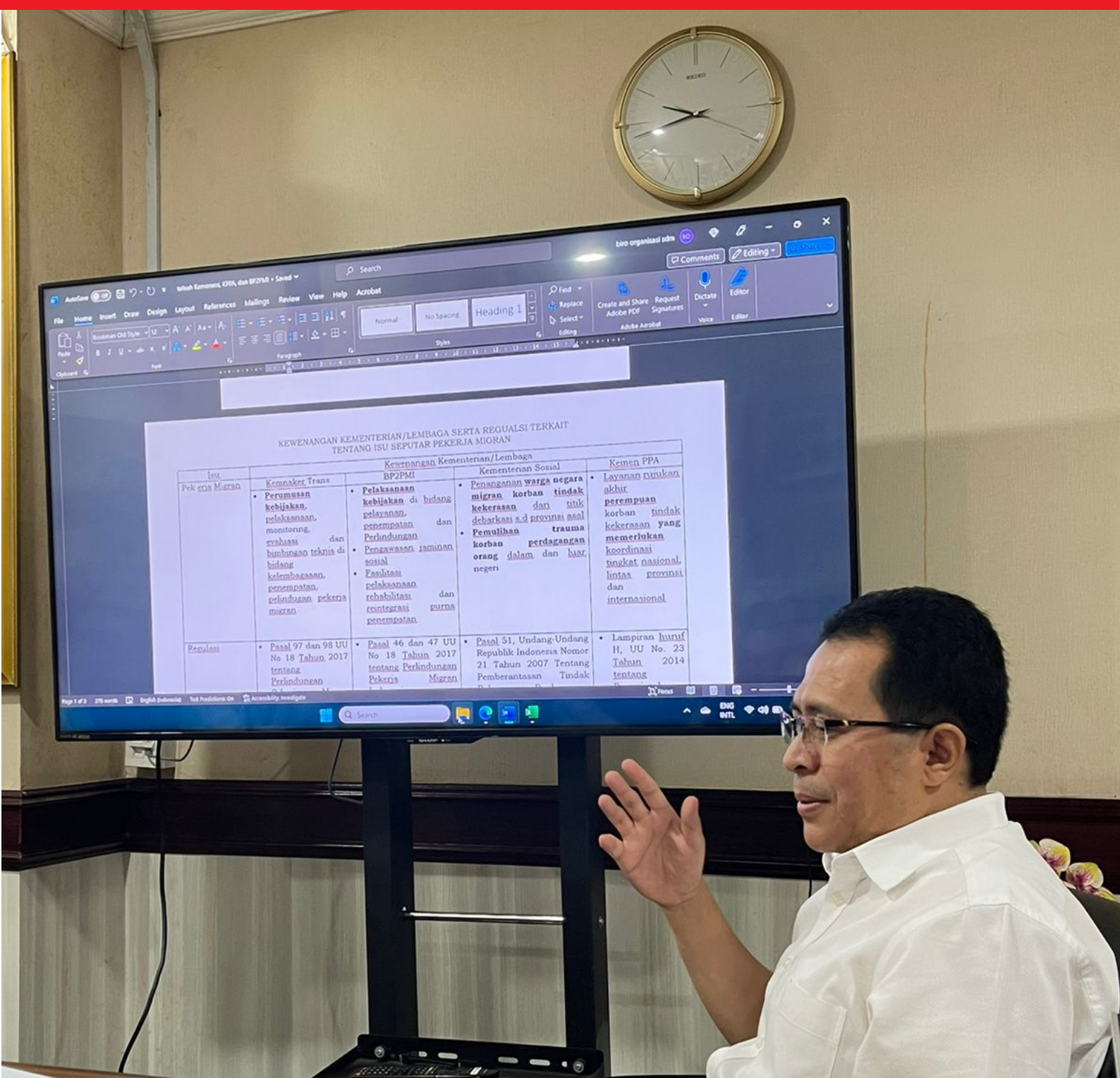
04

PENUTUP

menguraikan kesimpulan umum atas capaian keinerja Pusdiklatbangprof Tahun 2023 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya

02

PERENCANAAN KINERJA



The monitor displays a document titled "KEWENANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA REGULASI TERKAIT TENTANG ISU SEPUTAR PEKERJA MIGRAN". The document is presented in a table format with the following content:

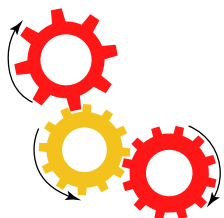
Isu	Kemnaker Trans	BP2PMI	Kementerian Sosial	Kemen PPA
Pekerja Migran	<ul style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, penempatan, perlindungan pekerja migran	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, penempatan dan perlindunganPengawasan jaminan sosialFasilitasi pelaksanaan rehabilitasi reintegrasi penempatan	<ul style="list-style-type: none">Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan titik daharakan s.d provinsi asalPemulihan trauma korban perdagangan orang dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none">Layanan rujukan akhir perempuan korban tindak kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional
Regulasi	<ul style="list-style-type: none">Pasal 97 dan 98 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran	<ul style="list-style-type: none">Pasal 46 dan 47 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran	<ul style="list-style-type: none">Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak	<ul style="list-style-type: none">Lampiran huruf H, UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Rencana Strategis Pusdiklatbangprof 2020-2024

VISI



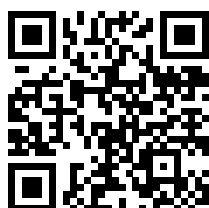
“Menjadi unit Kementerian Sosial yang akuntabel dan kredibel dalam mewujudkan SDM Kesejahteraan Sosial yang unggul, kelembagaan bidang kesejahteraan sosial yang professional serta masyarakat yang mampu dan mandiri”



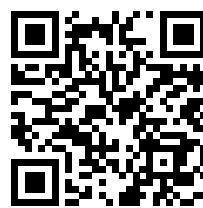
MISI



1. Meningkatkan kualitas lembaga di Bidangnya yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
2. Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggaraan Kesos
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat
4. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar
5. Meningkatnya Tata Kelola dan kualitas layanan Pusdiklatbangprof
6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretariat Jenderal



Dokumen Perjanjian
Kinerja Kepala
Pusdiklatbangprof
2023



Dokumen Rencana
Strategis
Pusdiklatbangprof
2020-2024

Rencana Strategis Pusdiklatbangprof 2020-2024

“Tujuan yang ingin dicapai oleh Renstra Pusdiklatbangprof tahun 2020- 2024 adalah: Mewujudkan SDM Kesejahteraan Sosial yang unggul, kelembagaan Bidanganya yang professional serta masyarakat yang mampu dan mandiri dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta agenda, sasaran, indikator dan target Kementerian Sosial 2020-2024 yang dilengkapi dengan sasaran strategis dan indikator sebagai ukuran kinerja.”



Tujuan tersebut diukur dengan indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi
2. Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi
3. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program yang Mengikuti Diklat
4. Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidanganya
5. Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos serta Memiliki Kinerja Baik
6. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan
7. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan social
8. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya
9. Persentase (%) Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya



PERJANJIAN KINERJA PUSDIKLATBANGPROF TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi **73%**

2

Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi **82%**

Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnyanya **82%**

Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik **85%**

3

Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan **100%**

4

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial **80%**

5

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya **60%**

Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya **80%**

6

Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas

Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof **80**

Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof **91**

7

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof **90**

PERUBAHAN PAGU ANGGARAN PUSDIKLATBANGPROF 2023

43.177.722.000

30 November 2022

Pagu Awal Pusdiklatbangprof tahun 2023

0

43.177.722.000

27 Desember 2022

Blokir AA pada belanja pegawai senilai Rp. 6.999.384.000 dan belanja barang senilai 2.000.000.000

1

43.177.722.000

07 Maret 2023

Revisi pergeseran antar KRO pada program Pusdiklatbangprof

2

40.177.722.000

29 Maret 2023

Revisi pergeseran anggaran Rp 3.000.000.000 ke biro umum terkait Pemenuhan Fasilitas pendukung kegiatan atensi di Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung

3

40.177.722.000

07 Juli 2023

Pemutahiran Data hasil revisi POK ke Aplikasi Omspan

4

33.178.338.000

23 Juli 2023

Revisi Blokir AA Belanja Pegawai Rp 6.999.384.000 ke BA BUN

5

33.667.881.000

18 Agustus 2023

Penambahan Pagu PNBPN sebesar Rp. 489.543.000 yang semula Rp 90.608.000 menjadi Rp 580.151.000 yang digunakan untuk Diklat PKP dari Kemenkumham

6

37.679.881.000

29 September 2023

Penambahan pagu belanja pegawai dari Biro Keuangan guna menutup pagu minus sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 4.012.000.000

7

37.679.881.000

06 Oktober 2023

8

38.057.093.000

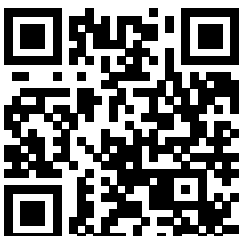
07 November 2023

9

38.057.093.000

29 November 2023

Pagu Akhir Anggaran Tahun 2023





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2023

Garis besar kegiatan yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja Pusdikltbangprof tahun 2023 adalah seluruh kegiatan dilaksanakan serta menjadi capaian Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklatbangprof tahun 2023 meliputi kegiatan

1. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial
3. Monev Alumni Polteksos yang berkerja di Bidangnyanya
4. Pelatihan Kesejahteraan Sosial
5. Layanan Atensi yang memuat 3 sasaran kegiatan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat
7. Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja
8. Evaluasi Nilai Anggaran
9. Survei Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusdiklatbangprof

Setiap sasaran kegiatan memiliki capaian indikator yang dapat diukur menggunakan mekanisme masing-masing disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pelaksanaan kegiatan.

1. Kegiatan akreditasi dan sertifikasi dihitung secara kuantitatif dari capaian output sesuai dengan pencapaian tujuan program
2. Kegiatan atensi, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kesejahteraan sosial dihitung secara kualitatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dengan unit teknis terkait
3. Kegiatan nilai akuntabilitas kinerja, nilai anggaran, alumni berkerja di bidangnyanya dan Survey Kepuasan Masyarakat didasarkan oleh hasil penilaian berdasar ketentuan yang ditetapkan institusi lain seperti Kemenpan RB, Kementerian Keuangan dan Kemendikbud.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan berdasar Definisi Operasional
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	$n/T \times 100\%$ n : Jumlah Lembaga di bidang Kesos yang terakreditasi T: Jumlah Lembaga di bidang Kesos yang mengikuti proses akreditasi
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	$n/T \times 100\%$ n : Jumlah SDM di bidang Kesos yang tersertifikasi T: Jumlah SDM di bidang Kesos yang mengikuti seluruh proses sertifikasi
		Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnyanya	$n/T \times 100\%$ Persentase lulusan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial = (Jumlah Lulusan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial / T) x 100%. T = Total jumlah lulusan tahun 2021
		Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	$n/T \times 100\%$ n Jumlah SDM Kesos yang berkinerja baik T: Jumlah SDM Kesos yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
3	Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan	$n/T \times 100\%$ n: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya T: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan ATENSI berupa bantuan kebutuhan dasar
4	Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	$n/T \times 100\%$ n: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosialnya T: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan ATENSI berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aks esibilitas.
5	Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	$n/T \times 100\%$ n: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya T: Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan ATENSI berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan
		Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	$n/T \times 100\%$ n : Jumlah KPM Berdikari dan Mandatori yang meningkat pendapatan T : Jumlah Penerima KPM Berdikari dan Mandatori
6	Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof	Berdasarkan nilai evaluasi kinerja Kemenpan RB
		Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof	Berdasarkan penggabungan nilai nilai IKPA dan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan RI
7	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Stakeholder yang dilakukan oleh masing - masing Satuan Kerja berdasarkan Permenpan no .. tahun ...



ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

SK 1

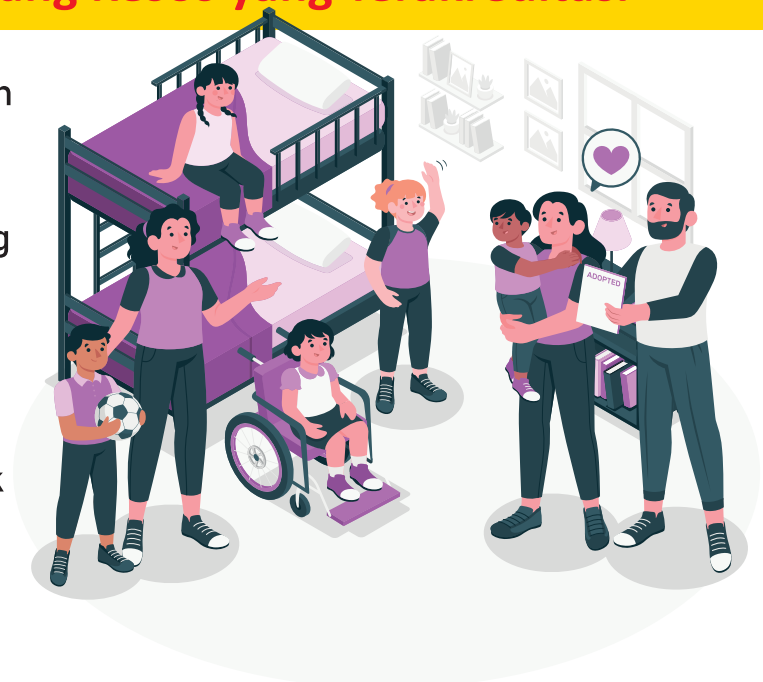
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini diampu oleh capaian BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung. Ketercapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi. Capaian sasaran kegiatan meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar adalah 80,43 %

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	80.43%	104.42%

1.1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan adanya peningkatan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar yaitu salah satunya melalui akreditasi LKS oleh Kementerian Sosial. Akreditasi menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial secara baik dan berkualitas sesuai dengan amanah Undang-undang tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Akreditasi LKS berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat layanan sosial. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di Bidangnya yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan pra sarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan social. Maksud akreditasi LKS adalah menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi terhadap UPT milik Pemerintah, UPTD milik Pemda, dan Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial maupun yang mandiri.

Tahun 2023 Pusdiklatbangprof melalui BBPPKS dan Poltekesos terdapat peningkatan capaian LKS dari target dalam dokumen perencanaan tahun 2023 sebanyak 2.555 LKS meningkat menjadi 2.848 LKS yang melakukan pendaftaran dan masuk dalam sistem e-akreditasi Kementerian Sosial RI. Dari total LKS yang mendaftar terdapat sebanyak 2.668 LKS melaksanakan proses akreditasi secara lengkap dan sebanyak 2.146LKS telah lulus mendapatkan

nilai akreditasi A, B dan C. Di tahun 2023, sebanyak 322 lembaga tidak mendapatkan nilai akreditasi dengan beberapa pertimbangan nilai akreditasi dibawah standar serta 200 lembaga tidak dapat diakreditasi karena beberapa faktor antara lain tidak memenuhi syarat LKS, tidak adanya atau tidak siapnya pengurus untuk dilakukan akreditasi serta legalitas LKS yang sudah expired. LKS harus melakukan reakreditasi LKS kembali sesuai dengan

No	Satuan Kerja	Target Lembaga	Target PK	LKS Mendaftar	LKS Mengikuti Akreditasi	LKS Lulus Nilai	Capaian
1	BBPPKS Padang	510	73%	573	521	397	76.20%
2	BBPPKS Bandung	425		490	436	322	73.85%
3	BBPPKS Yogya	510		600	558	526	94.27%
4	BBPPKS Banjarmasin	60		86	74	56	75.68%
5	BBPPKS Makassar	175		199	179	175	97.77%
6	BBPPKS Jayapura	25		25	25	21	84.00%
7	Poltekesos Bandung	850		868	868	643	74.08%
8	Pusdiklatbangprof			7	7	6	
9	Total Capaian	2.555			2.848	2.668	2.146



Capaian Lembaga yang terakreditasi oleh BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung menjadi total capaian dari Pusdiklatbangprof. Selama tahun 2023 jumlah LKS yang telah melaksanakan proses akreditasi dan mendapatkan penetapan nilai serta masuk dalam kategori mampu melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar yaitu sebesar 80,43% dari total seluruh LKS yang mengikuti proses akreditasi secara lengkap

Tabel Rekapitulasi Hasil Akreditasi LKS tahun 2023

No	Satuan Kerja	LKS Lulus Nilai	A	B	C	TTA	TTD
1	BBPPKS Padang	397	9	120	268	67	57
2	BBPPKS Bandung	322	2	59	261	86	28
3	BBPPKS Yogya	526	105	223	198	25	7
4	BBPPKS Banjarmasin	56	7	9	40	13	5
5	BBPPKS Makassar	175	10	40	125	4	
6	BBPPKS Jayapura	21		9	12		4
7	Poltekesos Bandung	643	15	155	473	127	98
8	Pusdiklatbangprof	6		1	5		1
9	Pusdiklatbangprof	2.146	148	616	1.382	322	200

* TTA = Tidak Bisa mendapat nilai Akreditasi

* TTD = Tidak Dapat dilakukan Akreditasi Lembaga

Dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun sebelumnya diperoleh data terdapat kenaikan sebesar 6,06% dibandingkan capaian tahun 2022 dan terdapat kenaikan sebesar 8,35 % terhadap capaian realisasi tahun 2021 hal ini menggambarkan terjadi peningkatan LKS yang mendapat lulus akreditasi dengan nilai A,B dan C pada tahun 2023. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar : 73%

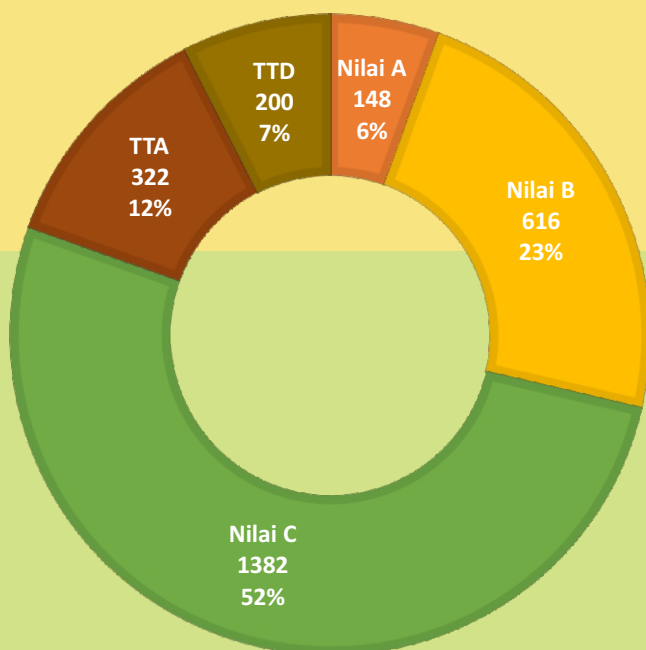
Indikator Kegiatan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	78.85%	72.08%	74.37%	80.43%	73%

Dilihat dari rekapitulasi capaian jumlah yang mendaat nilai terdapat peningkatan capaian LKS terakreditasi yaitu 2.146 LKS A (6,90%), B (28,70%) dan C (64,40%) meningkat dari tahun 2022 – 1.361 LKS A (6,47%), B (30,64%) dan C (62,89%).

Periode	Nilai A		Nilai B		Nilai C		Total
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Tahun 2022	88	6.47%	417	30.64%	856	62.89%	1.830
Tahun 2023	148	6.90%	616	28.70%	1.382	64.40%	2.146

AKREDITASI LKS TAHUN 2023

■ Nilai A ■ Nilai B ■ Nilai C ■ TTA ■ TTD



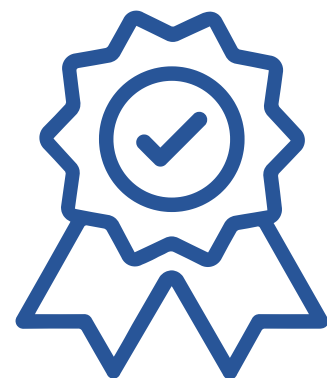
Dilihat dari rekapitulasi capaian jumlah yang mendaat nilai terdapat peningkatan capaian LKS terakreditasi yaitu 2.146 LKS A (6,90%), B (28,70%) dan C (64,40%) meningkat dari tahun 2022 – 1.361 LKS A (6,47%), B (30,64%) dan C (62,89%).

Tahun 2023 terdapat 2.146 LKS dengan hasil

- Akreditasi A 146 LKS
- Akreditasi B 616 LKS
- Akreditasi C 1.382 LKS
- TTA 148 LKS
- TTD 200 LKS

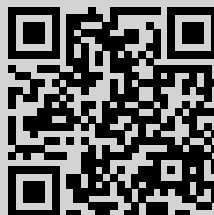
Selama tahun 2023 terdapat 2.668 LKS yang mengikuti akreditasi 'dengan status LKS hasil mendapat nilai akreditasi LKS yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar yaitu 2.146 LKS atau

80,43%



Tabel Rekapitulasi Hasil LKS Terakreditasi A, B dan C berdasarkan Provinsi tahun 2023

Provinsi	A	B	C	Total
Aceh	1	34	63	98
Bali	6	21	16	43
Banten	1	29	123	153
Bengkulu		5	17	22
DI Yogyakarta	5	16	27	48
DKI Jakarta	3	6	51	60
Gorontalo		1	3	4
Jawa Barat	5	63	341	409
Jawa Tengah	68	61	73	202
Jawa Timur	33	184	154	371
Kalimantan Barat		5	21	26
Kalimantan Selatan	2	6	19	27
Kalimantan Tengah	2	1	10	13
Kalimantan Timur	2	1	9	12
Kalimantan Utara	1	1	2	4
Kepulauan Riau	1	5	26	32
Lampung		14	27	41
Maluku			1	1
Maluku Utara		1		1
Nusa Tenggara Barat		19	77	96
Nusa Tenggara Timur	1	21	27	49
Papua		1	6	7
Papua Barat			1	1
Papua Selatan		1		1
Papua Tengah		6	4	10
Riau	3	15	18	36
Sulawesi Barat		2	2	4
Sulawesi Selatan	7	22	77	106
Sulawesi Tengah		5	7	12
Sulawesi Tenggara	1	4	15	20
Sulawesi Utara	2	6	21	29
Sumatera Barat	3	35	44	82
Sumatera Selatan		9	51	60
Sumatera Utara	1	17	49	67
Total	148	616	1382	2146



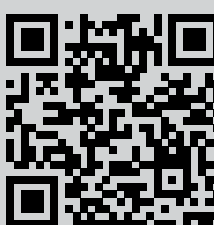
Akreditasi LKS
berdasarkan
Cluster tahun
2023



Data Peringkat
LKS terakreditasi
per Provinsi



Rekapitulasi Total
Akreditasi LKS
Pusdiklatbangprof
tahun 2023



Laporan Akhir
Akreditasi LKS
Pusdiklatbangprof
2023

Tabel Rekapitulasi Hasil Akreditasi LKS berdasarkan Cluster Layanan 2023

Cluster Layanan	A	B	C	TTA	TTD	Total LKS
Cluster Anak	105	485	1.069	236	150	2.045
Cluster Disabilitas	22	46	108	34	15	225
Cluster KBK	5	27	36	16	8	92
Cluster Lansia	13	51	133	24	21	242
Cluster Pemberdayaan Sos	3	8	36	13	4	64
Grand Total	148	617	1.382	323	198	2.668

Analisis Faktor Pendukung

1. Pelaksanaan Akreditasi LKS melibatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Kab/kota, Pusdiklatbangprof terkait data LKS, Forum LKS di wilayah kerja
2. Proses akreditasi dimulai tidak hanya mengandalkan pendaftaran dalam sistem e-akreditasi tetapi Tim Pokja Sertifikasi SDM Kesos Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos melakukan perluasan penjangkauan LKS target akreditasi ke Dinas Sosial Provinsi/Kota sebagai tambahan data LKS yang akan diakreditasi
3. Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah mendukung akreditasi LKS dan LKSA di wilayahnya melalui adanya penerbitan SOP standar pelayanan publik penerbitan rekomendasi penetapan/ terdaftar LKS di sejumlah Pemprov/kot/kab sebagai contoh di Kota Banjarmasin, Pubalingga, Magetan, Tegal
4. Sistem e-akreditasi yang dibangun “user friendly”ramah pengguna memudahkan LKS untuk mengikuti seluruh proses akreditasi dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat hasil akreditasi
5. Assesor melakukan pendampingan penggunaan sistem e-akreditasi kepada LKS serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada LKS untuk memenuhi persyaratan LKS dapat di akreditasi.
6. Hubungan Pusdiklatbangprof dengan BALKS terkait pengawasan dan monitoring capaian
7. Forum LKS di tingkat prov/kab/kota menjadi basis media sosialisasi akreditasi kepada LKS di wilayah kerja BBPPKS dan poltekesos
8. Penguatan Kapasitas Assesor melalui Bimtek dilakukan oleh Pusdiklatbangprof dan BBPPKS tahun 2023.
9. Sosialisasi proses akreditasi LKS kepada stakeholder terkait terumta pemerintah daerah, dinas sosial prov dan kota/kab di wilayah kerja BBPPKS
10. Pemetaan LKS yang terakreditasi berdasarkan kluster layanan dapat dimanfaatkan oleh unit teknis terkait dalam memetakan kondisi LKS

Analisis Efisiensi

1. Pelaksanaan Bimtek assesor dilaksanakan secara hybrid dengan menggunakan format daring dan luring
2. Pemanfaatan aplikasi e-Akreditasi Kemensos menjadi alat proses akreditasi LKS sekaligus basis data LKS terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian sosial dengan dukungan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial
3. Penguatan Keterlibatan Pemerintah daerah/Dinas Sosial melalui sosialisasi sekaligus sebagai jembatan informasi BALKS Kementerian Sosial dengan LKS diseluruh wilayah kerja.
4. BALKS melakukan modifikasi instrumen akreditasi bagi para assesor sehingga memudahkan kerja para assesor untuk melakukan assessment dan penelaahan LKS

Rekomendasi

1. Peningkatan frekuensi dan durasi penyelenggaraan bimtek bagi assesor dan sosialisasi bagi LKS terkait pelaksanaan akreditasi
2. Dibentuk Forum Komunikasi antara Kementerian Sosial, BALKS, Pemerintah Daerah (Dinas Sosial Prov/Kab/Kota), Kementerian/Lembaga terkait dan LKS dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LKS. Termasuk pada LKS yang telah terakreditasi untuk memastikan LKS tidak melakukan malpraktek layanan dan melakukan layanan dibawah standar
3. BALKS secara berkelanjutan memastikan assesor memiliki standar kualifikasi BNSP
4. Penelaahan assessment oleh assesor dalam proses akreditasi LKS harus mengacu kepada regulasi/kebijakan spesifik sesuai karakter organisasi LKS sebagai contoh SPM bidang Sosial, Sistem Nasional Perlindungan Anak, regulasi penyelenggaraan IPWL, peraturan turunan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dll
5. Integrasi Data Akreditasi LKS Pusdiklatbangprof dengan unit terkait melalui Pusdatin Kemensos
6. Optimalisasi peran BALKS meningkatkan kapasitas assesor serta penguatan kebijakan terkait akreditasi LKS

SK 2

Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan adanya peningkatan profesionalisme penyelenggara kesejahteraan kesos yang diselenggarakan oleh SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan ini diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi, Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya dan Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	82%	95.40%	102.55%
2	Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya	82%	82.83%	101.01%
3	Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	85%	90.31%	114.54%

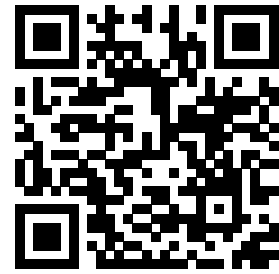
2.1 Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi

Sasaran sertifikasi SDM Kesos berupaya menstandarkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial RI memiliki banyak SDM kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh unit kerja kementerian sosial yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri dari : Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial.



Capaian SDM Kesos tersertifikasi BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung menjadi total capaian dari Pusdiklatbangprof. Dalam dokumen perencanaan Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung telah ditetapkan target total 15.300 SDM Kesos dapat disertifikasi. Dalam pelaksanaan sertifikasi SDM Kesos, seluruh satuan kerja BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung mampu meningkatkan jangkauan hingga 24.034 SDM Kesos untuk mendaftar sertifikasi SDM Kesos tahun 2023.

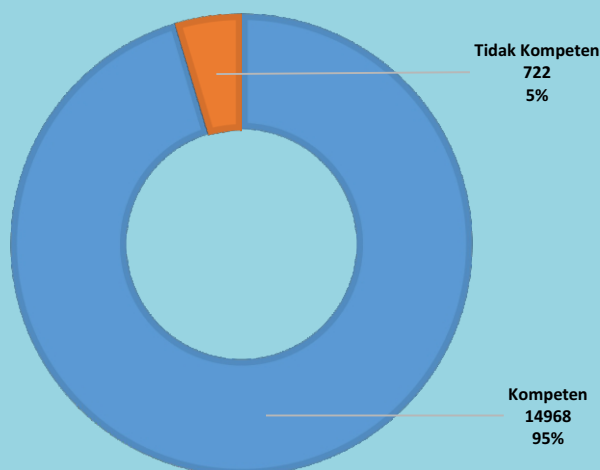


BNBA Sertifikasi SDM Kesos
BBPPKS regional 1-6 dan
Poltekesos Bandung tahun 2023

Tabel Rekapitulasi Hasil Sertifikasi SDM Kesos tahun 2023

No	Satuan Kerja	Target SDM Kesos	Target PK	SDM Mendaftar	SDM Mengikuti Sertifikasi	SDM Lulus Nilai	Capaian	
1	BBPPKS Padang	2.550	82%	3.830	2.814	2.760	98.08%	
2	BBPPKS Bandung	3.400		5.357	3.401	3.283	96.53%	
3	BBPPKS Yogya	3.400		6.326	3.467	3.343	96.42%	
4	BBPPKS Banjarmasin	425		793	443	410	92.55%	
5	BBPPKS Makassar	850		1.610	926	876	94.60%	
6	BBPPKS Jayapura	255		402	219	157	71.69%	
7	Poltekesos Bandung	4.420		5.702	4.420	4.139	93.64%	
9	Pusdiklatbangprof	15.300			24.034	15.690	14.968	95.40%

SERTIFIKASI SDM KESOS TAHUN 2023



Dari keseluruhan SDM terdaftar sebanyak 65,28% atau sebanyak 15.690 yang mengikuti proses sertifikasi SDM Kesos secara lengkap dan dapat dinilai. Dari seluruh SDM Kesos yang mengikuti proses sertifikasi terdapat 95,40% diantaranya atau sebanyak 14.968 SDM Kesejahteraan Sosial dinyatakan kompeten dan mendapat sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial RI dengan masa waktu 5 tahun, SDM harus melakukan resertifikasi SDM Kesos kembali

Tabel Rekapitulasi Hasil Sertifikasi SDM Kesos berdasarkan Jenis SDM

No	Satuan Kerja	Pekerja Sosial	TKS	Relawan Sosial
1	BBPPKS Padang	63	1.841	856
2	BBPPKS Bandung	84	1.259	1.940
3	BBPPKS Yogya	178	2.041	1.124
4	BBPPKS Banjarmasin	8	109	293
5	BBPPKS Makassar	50	547	279
6	BBPPKS Jayapura	3	91	63
7	Poltekesos Bandung	582	1.827	1.730
8	Pusdiklatbangprof	968	7.715	6.285
9	Pusdiklatbangprof	14.968 SDM Kesos Tersertifikasi		

Capaian SDM tersertifikasi tahun 2023 adalah 14.968 SDM kesos terdiri dari 968 Pekerja sosial, 7.715 TKS dan 6.285 Relawan Sosial



Dari SDM Kesos yang Mengikuti Proses Sertifikasi sebanyak 14.968 SDM Kesos Tersertifikasi Kompeten atau

95.40%

Indikator Kegiatan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	66.10%	85.05%	88.84%	95.40%	82%

Dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun sebelumnya diperoleh data terdapat kenaikan sebesar 8,79% dibandingkan capaian tahun 2022 dan terdapat kenaikan sebesar 12,58 % terhadap capaian realisasi tahun 2021. Penetapan target 82% dikarenakan pada tahun 2023 belum dilakukan sinkronisasi database SDM kesos antara Pusdiklatbangprof, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dan Unit Teknis terkait yang memiliki SDM Kesejahteraan Sosial. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar : 82%

Periode Sertifikasi	Proses	Kompetern	Persentase
Tahun 2022	17.073	13.505	88.84%
Tahun 2023	15.690	14.968	95.40%

Dari analisis capaian tahun sebelumnya diperoleh data terjadi penurunan jumlah SDM yang mengikuti proses akreditasi sebesar 8,10% atau sebanyak 1.383 orang sedangkan dari capaian SDM kesos yang mendapatkan sertifikat kompeten terjadi peningkatan sebesar 10,83% atau sebanyak 1.463SDM Kesos dinyatakan lulus mendapatkan nilai dan sertifikat kompeten di tahun 2023

Analisis Faktor Pendukung

1. Perluasan penjangkauan SDM Kesos yang akan disertifikasi di seluruh satker BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos sehingga meningkatkan jumlah SDM Kesos yang mendaftar proses sertifikasi.
2. Peningkatan Dukungan dari Pemerintah Daerah fasilitasi proses Sertifikasi SDM Kesos dalam bentuk koordinasi dan pengerahan SDM Kesos di wilayah kerjanya untuk dilakukan sertifikasi SDM.
3. Hasil monev 2023 diperoleh data adanya kesiapan panitia penyelenggara dalam keseluruhan pelaksanaan sertifikasi SDM Kesos serta interaksi baik antara panitia dan peserta sertifikasi SDM Kesos memudahkan peserta menjalani keseluruhan proses sertifikasi.

Analisis Efisiensi

1. Sosialisasi sertifikasi SDM Kesos oleh Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos secara daring melalui zoom meeting dan youtube
2. Sertifikasi SDM Kesos dilaksanakan secara daring dan luring

Analisis Hambatan

1. Belum memiliki Sistem Aplikasi Terintegrasi terkait Sertifikasi SDM Kesos di tahun 2023
2. Belum adanya data tunggal seluruh SDM Kesos di lingkungan Kementerian Sosial termasuk integrasi dengan data Pusdatin Kementerian Sosial dan data di masing-masing unit terkait yang memiliki SDM kesos.
3. Adanya ketidaksiapan SDM kesos untuk dilakukan sertifikasi sehingga sebanyak 34,73% SDM yang telah mendaftar tidak mengikuti proses sertifikasi secara lengkap

Rekomendasi

1. Peningkatan bimbingan teknis lanjutan yang tematis dan relevan bagi SDM Kesos yang sudah tersertifikasi sehingga dapat memenuhi fungsinya dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sertifikasi SDM Kesos perlu didukung Sistem Informasi Manajemen yang menjadi alat untuk penyelenggaraan dalam proses sertifikasi. Sistem manajemen sertifikasi data secara keseluruhan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi memberikan fondasi untuk pengelolaan sumber daya dan kebijakan berorientasi hasil.
3. Penguatan Kemitraan dengan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah, Memperkuat jaringan dan kemitraan dengan pemerintah hal menjadi hal penting untuk memperluas dan meningkatkan kompetensi
4. Perlu dilakukan pengukuran persepsi publik terkait dampak sertifikasi SDM Kesos terhadap profesionalisme pekerja sosial serta hubungannya penguatan reputasi dan kredibilitas SDM Kesos
5. Perlu dilakukan pemadanan dan update data SDM tersertifikasi baik di Direktorat Teknis maupun di Dinas Sosial

2.2 Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya

Sasaran indikator kinerja Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya diampu oleh Poltekesos Bandung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah capaian alumni poltekesos yang mampu bekerja sesuai dengan bidangKesejahteraan Sosial setelah mengenyam pendidikan, baik program diploma terapan,maupun magister. Tracer study merupakan suatu instrumen yangdigunakan oleh perguruan tinggi untuk melacak aktivitas lulusannya setelah menyelesaikan masa pendidikan tinggi yangdilakukan 2 tahun setelah lulus. menggunakan acuan sistem kuisisioner yang diadopsi dari tracer study kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

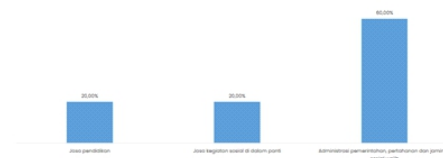


Target responden Tracer Study Poltekesos Tahun 2023 adalah lulusan yang wisuda pada tahun 2021 dengan jumlah 353 alumni sarjana terapan, dan 11 alumni magister terapan. Dari jumlah responden 353 alumni sarjana terapan yang mengisi kuesioner survei secara lengkap sebanyak 278 (78,75%) alumni dan dari jumlah responden 11 alumni magister terapan yang mengisi kuesioner survei secara lengkap sebanyak 7 (63,64%) responden. Total responden alumni poltekesos yang diambil data dalam tracer study ini sebanyak 285 alumni

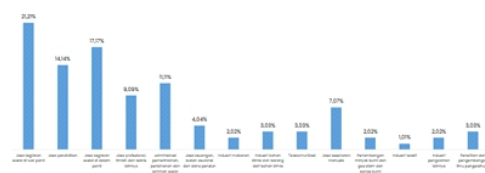
Poltekesos Bandung

Tracer study merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk melacak aktivitas lulusannya setelah menyelesaikan masa pendidikan tinggi yang dilakukan 2 tahun setelah lulus.

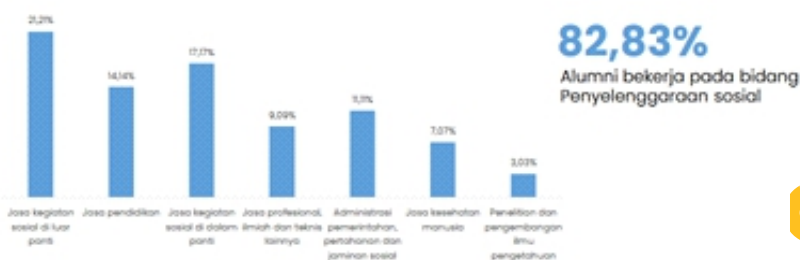
Bidang Pekerjaan Magister Terapan



Bidang Pekerjaan Sarjana Terapan



Bidang Pekerjaan Kesejahteraan Sosial



Tabel Rekapitulasi Alumni Poltekesos Bekerja di Bidangnya

No	Bidang Pekerjaan	Magister Terapan		Sarjana Terapan	
		2022	2023	2022	2023
1	Instansi Pemerintah	57.14%	80%	51.06%	42.20%
2	Organisasi Non Profit	21.43%		16.31%	12.84%
3	Perusahaan Swasta	7.14%	20%	24.11%	34.86%
4	Wiraswasta / Usaha Sendiri	14.29%		8.51%	2.75%
5	Lainnya				7.34%

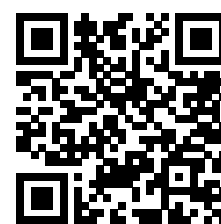
Indikator Kinerja Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya merupakan indikator baru pada tahun 2021 saat Pusdiklatbangprof dikoordinasikan oleh sekretariat jenderal oleh karena itu pengukuran menggunakan perbandingan dengan basis data tahun 2021-2022. Terjadi penurunan capaian persentase alumni Poltekesos yang bekerja di bidangnya dikarenakan tidak seluruh Mahasiswa Magister Terapan alumni Poltekesos tahun 2021 mengikuti Tracer Study 2023

Tracer Study tahun 2023 :

1. Durasi waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama rata-rata alumni Poltekesos Bandung adalah 4,6 bulan.
2. Alumni Poltekesos Bandung terbukti adaptif pada semua bidang pekerjaan, terutama Bidangnya.
3. Situasi alumni 2021 menunjukkan bahwa 87,10% alumni sedang bekerja, dan 82,83% diantaranya bekerja di bidang penyelenggaraan sosial. Instansi pemerintah, termasuk BUMN merupakan tempat bekerja dengan persentase terbesar bagi alumni 2021

Indikator Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya	80.00%	84.47%	82.83%	82%

Terjadi penurunan capaian alumni bekerja di bidang kesos dari 84,47% tahun 2022 menjadi 82,83% karena berkurangnya alumni poltekesos yang mengisi tracer studi secara lengkap. Terdapat selisih 9 alumni mengisi secara lengkap tracer studi antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Jumlah alumni sarjana terapan dari 277 sarjana terapan mengisi lengkap menjadi 278 sarjana terapan dan 17 magister terapan pada tahun 2022 menjadi 7 mahasiswa terapan yang mengisi tracer studi



Tracer Study Poltekesos Bandung tahun 2023

Analisis Faktor Pendukung

1. Tingginya persepsi alumni Poltekesos mengenai alasan pemilihan pekerjaan sesuai Bidanganya (22,50%)
2. Mata Kuliah Praktikum merupakan metode pembelajaran yang paling besar penekanannya selama menjadi mahasiswa di Poltekesos bandung sehingga mampu secara signifikan mendukung lulusan polteksos bekerja di Bidanganya
3. Poltekesos menggunakan kuesioner mengacu pada ambang batas minimal rate tracer studi Kemendikbud sebesar 60%

Rekomendasi

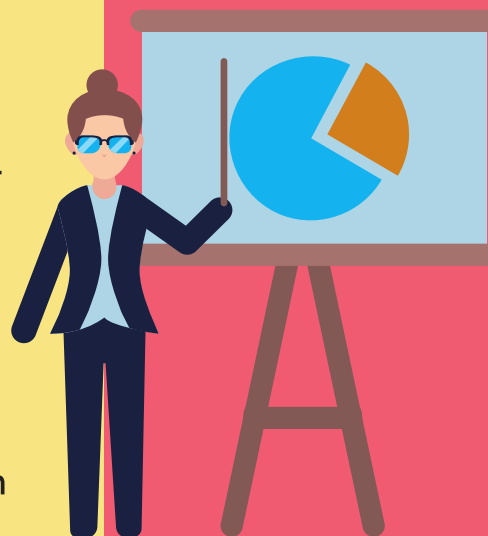
1. Integrasi data alumni dan penguatan data base alumni poltekesos yang memuat status mahasiswa aktif, alumnus poltekesos hingga informasi pekerjaan terakhir alumnus update berkelanjutan
2. Tracer studi wajib dilaksanakan kepada seluruh alumni poltekesos minimal 2 tahun setelah kelulusan sehingga poltekesos dapan secara berkala mengetahui perkembangan alumni poltekesos yang bekerja di bidanganya



SIDANG TERBUKA SENAT
WISUDA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TAHUN 2023

2.3 Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik

Profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur dari kinerja yang dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki kinerja yang baik. Pengukuran indikator kinerja yang baik diperoleh dari presentase SDM kesejahteraan sosial yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diukur dari hasil monitoring dan evaluasi alumni diklat yang telah mengimplementasikan diklat yang diterima.



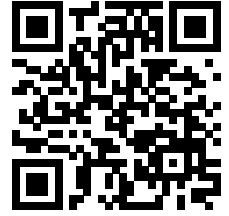
Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Diklat Pusdiklatbangprof tahun 2023

No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Target PK	Target Pelatihan	Capaian
1	SIKS-NG BATCH 1-20					
	SIKS-NG BATCH 1	11-14 Januari	Pusdiklat Kesos	85%	2.160	45
	SIKS-NG BATCH 2	18-21 Januari	BBPPKS Bandung			77
	SIKS-NG BATCH 3	25-28 Januari	Pusdiklat Kesos			69
	SIKS-NG BATCH 4	1-4 Februari	BBPPKS Yogya			120
	SIKS-NG BATCH 5	7-10 Februari	BBPPKS Yogya			108
	SIKS-NG BATCH 6	6-9 Februari	BBPPKS Jayapura			50
	SIKS-NG BATCH 7	9-12 Februari	BBPPKS Jayapura			31
	SIKS-NG BATCH 8/13	8-11 Maret	BBPPKS Makassar			48
	SIKS-NG BATCH 9	14-18 Februari	BBPPKS Banjarmasin			90
	SIKS-NG BATCH 10	21-25 Februari	BBPPKS Banjarmasin			116
	SIKS-NG BATCH 11	22-25 Februari	BBPPKS Padang			71
	SIKS-NG BATCH 12	1-4 Maret	BBPPKS Padang			72
	SIKS-NG BATCH 14	8-11 Maret	BBPPKS Yogyakarta			57
	SIKS-NG BATCH 15	15-18 Maret	BBPPKS Makassar			70
	SIKS-NG BATCH 16	28-31 Maret	BBPPMPV BBL Medan			95
	SIKS-NG BATCH 17	28-31 Maret	BBPPKS Makassar			35
	SIKS-NG BATCH 18	5-8 April	BBPPMPV BBL Medan			67
	SIKS-NG BATCH 19	5-8 April	BBPPKS Makassar			45
	SIKS-NG BATCH 20	12-15 April	BKPSDM Daerah Kep Babel			23
	SIKS-NG TA KOMISI VIII DPR	21 June 2023	CAWANG KENCANA			54
	TOTAL SIKS-NG BATCH 1-20					
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I		LAN			1
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II		LAN			11
3	TASK FORCE TAGANA	8-23 Februari 2023	Cijantung, TC Hambalang, STIS Cibinong			30
4	PENYEGARAN KEILMUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	21-24 Februari 2023	Pusdiklatbangprof			29
5	Pelatihan Kolaboratif Antar Profesi	6-12 Juni 2023	SENTRA TERPADU SOEHARSO - SOLO			105



No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Target PK	Target Pelatihan	Capaian
6	WEB DAN KONTEN MEDIA					
	WEB DAN KONTEN MEDIA 1	22 - 26 Mei 2023	BBPPKS BANDUNG			35
	WEB DAN KONTEN MEDIA 2	5-9 Juni 2023	BBPPKS MAKASSAR			42
	WEB DAN KONTEN MEDIA 3	12-16 Juni 2023	BBPPKS YOGYAKARTA			45
7	Pengendalian Risiko Pengelolaan Keuangan Bendahara di Lingkungan Kemensos					
	Batch-1	3-6 April 2023	BPKP Ciawi Bogor			30
	Batch-2	13-16 Juni 2023	Pusdiklatbangprof			44
8	Pelatihan Dasar Terapi Fisik bagi Calon Instruktur	12-16 Juli	Sentra Wyata Guna			43
9	Coaching PENA	8-11 Agust	Ciumbuleuit Bandung			39
10	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas-1 (14 Peserta Kemensos + 46 PNBP)	8 Agust - Nov	Pusdiklatbangprof			60
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas -3		Pusdiklabangprof			30
11	Pelatihan Kepemimpinan Administrator-1	15 Sept - Des	Pusdiklatbangprof			30
12	Pelatihan Data Analytics	11-15 Sept	Pusdiklatbangprof			27
13	Orientasi PPPK	7 November - 1	Pusdiklatbangprof			108
14	Refresment Bendahara	8-10 November	Pusdiklatbangprof			66
15	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan : bendahara dan Kepala Sentra	6-8 Desember	Pusdiklatbangprof			62
16	Pemantapan BMN	19-21 Desember	Pusdiklatbangprof			40
17	Peningkatan Kapasitas Pengurus LKSPD Batc I Makassar	10-14 Agustus 2023	BBPPKS Makassar			82
	Peningkatan Kapasitas Pengurus LKSPD Batch II Yogyakarta	20-24 Agustus 2023	BBPPKS Yogyakarta			120
18	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tk Ahli Angk V		Pusdiklat Kearsipan ANRI			16
	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan XVI		Pusdiklat Kearsipan ANRI			1
19	Diklat Fungsional Kearsipan (PKTK Penyusutan Arsip Negara)		Arsip Nasional RI			3
20	Diklat Arsiparis Tk. Terampil		Pusdiklat Kearsipan ANRI			4
21	Bimtek Pengajar & Fasilitator Pelatihan Khusus JFAK		Pusbin AK LAN			3

No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Target PK	Target Pelatihan	Capaian
22	Diklat Assessment Centre		PPM Manajemen Jakarta			1
23	Diklat Pembentukan JFT Pranata Humas		Pusdiklat Kominfo			5
24	Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		BPSDM HUKUM dan HAM			5
25	Temu Ilmiah Nasional V Tahun 2023 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia		IPK Indonesia			12
26	Pelatihan DBT Pada Adiksi Internet		UKS Semarang			2
TOTAL PESERTA DIKLAT TAHUN 2023				85%	2.160	2.474



Laporan Monev Pendidikan dan Pelatihan 2023

Capaian indikator kinerja Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik melekat pada kegiatan Pusdiklatbangprof. Pusdiklat memiliki data target peserta diklat sebanyak 2.160 orang dengan target realisasi sebanyak 2.474 orang meningkat **114,54%**. Target Capaian sesuai indikator SDM berkinerja baik adalah 85%

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan hasil monev Pusdiklatbangprof. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Desember kepada alumni pelatihan sebanyak 289 responden yang telah mengikuti pelatihan teknis bagi penyelenggara kesejahteraan sosial, terdapat 261 SDM yang telah mengimplementasikan hasil pelatihan di lingkungan kerja masing-masing atau sebanyak **90,31%** telah dianggap mampu mengimplementasikan hasil diklat di tempat kerja masing-masing alumni diklat.

Indikator Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	n/a	89.20%	90.31%	85%

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022 oleh karena itu pengukuran menggunakan perbandingan dengan basis data tahun

2022 terdapat kenaikan capaian sebesar **1,11%**

Periode Diklat	Alumni Diklat	Jumlah Alumni Diklat	Alumni Berkinerja Baik	Persen Alumni Bekerja Baik
Tahun 2022	908	334	302	89.20%
Tahun 2023	2.474	289	261	90.31%

Terdapat peningkatan jumlah peserta diklat tahun 2022 dari Jumlah 908 alumni diklat menjadi 2.474 alumni diklat Pusdiklatbangprof di tahun 2023

Analisis Faktor Pendukung

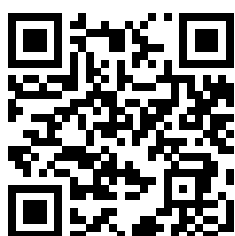
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial menyatakan tugas Pusdiklatbangprof adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi termasuk pengembangan kompetensi bagi ASN dan Non ASN untuk mendukung kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga.
2. Kolaborasi antara SDM Pusdiklatbangprof dengan SDM satuan kerja dalam pelaksanaan pelatihan tematis sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Mekanisme budget sharing pelaksanaan diklat tematik antara Pusdiklatbangprof dengan unit kerja terkait.
4. Ketersediaan Sarana dan prasarana pelatihan sesuai standar oleh Pusdiklatbangprof, Balai/ Sentra Terpadu/ Sentra dalam pelaksanaan pelatihan

Analisis Efisiensi

1. Pemanfaatan metode pelatihan dengan menggunakan model daring dan luring
2. Tidak seluruh pelatihan diselenggarakan di Pusdiklatbangprof Jakarta. Efisiensi anggaran dilakukan dengan pelatihan dilaksanakan di Sentra/Balai/ Masyarakat dengan Tenaga Pengajar dan Fasilitator serta panitia yang mendekat ke lokasi peserta serta pembatasan jumlah panitia.
3. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan dengan pola kolaborasi berbagai aspek dengan Satuan Kerja di lingkungan Kemensos.

Rekomendasi

1. Memastikan relevansi pelatihan melalui pembaharuan materi silabus pelatihan
2. Perencanaan pelaksanaan pelatihan lebih komprehensif dan terukur melalui rumusan Log Frame dalam penyusunan Term Of Reference seluruh pelaksanaan pelatihan.
3. Pelibatan multi stakeholder pelaksanaan pelatihan di lingkungan Kementerian Sosial sehingga semakin kolaboratif dan materi yang diberikan semakin relevan dengan kebutuhan lembaga.



Laporan Pokja
Pelatihan
Pusdiklatbangprof
tahun 2023

PENGANTAR PROGRAM ATENSI



1

Keputusan Menteri Sosial RI No. 221/HUK/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada BBPPKS, Poltekesos Bandung dan Pusdiklatbangprof mengamankan Pusdiklatbangprof selain melaksanakan fungsi kediklatan, juga melaksanakan fungsi layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Manajemen Kasus, Sertifikasi, Akreditasi, dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA).

Pusdiklatbangprof mengamankan fungsi layanan Rehabilitasi Sosial berupa Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) meliputi; dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, dan/atau dukungan aksesibilitas.

2

3

Peraturan Kepala Pusdiklatbangprof No 131/9/PR.01/2/2023 Tentang Rencana Strategis Pusdiklatbangprof Tahun 2020-2024 Menekankan Pusdiklatbangprof juga melaksanakan Fungsi atau tugas Sentra Layanan Sosial. Penambahan fungsi Pusdiklatbangprof menjadi salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas layanan sosial kepada masyarakat sehingga kehadiran Kementerian Sosial dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas

33

2/3
Sosial untuk Lansia
ya, Sumatera Barat
9-13 Mei 2023

SASARAN KEGIATAN TERKAIT LAYANAN ATENSI

SK 3	Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar
SK 4	Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial
SK 5	Masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatan

Layanan Atensi menjadi lingkup kegiatan yang wajib dilaksanakan dan menjadi target capaian yang tertuang dalam perjanjian kinerja kepala Pusdiklatbangprof, kepala BBPPKS dan direktur Poltekesos Bandung. Capaian dari Layanan Atensi menjadi bagian dari Isu Strategis seluruh satker dijabarkan dalam 3 Sasaran Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan	100%	100%	109.15%
2	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	80%	82.45%	110.00%
3	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatannya	60%	76.18%	109.08%

Dokumen perencanaan anggaran DIPA Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung 2023 ditetapkan target total layanan ATENSI sebanyak 12.334 PPKS dan tertuang sebagai target capaian Perjanjian Kinerja Kapusdiklatbangprof, Kepala BBPPKS dan Direktur Poltekesos 2023

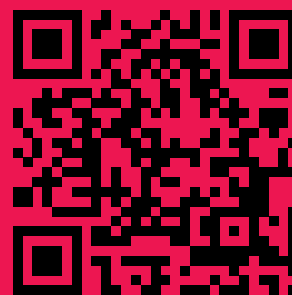
Sasaran utama layanan atensi mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Kelompok Rentan, KPN ODH, Korban Bencana dengan turunannya masing-masing. Sumber kasus yang mendapat respon layanan atensi berasal dari Reguler/Pendaftaran Mandiri/Outreach, Respon Kasus Pimpinan / WA Group / SIKD, Respon Kasus SIKS CC, Aspirasi DPR, Pengaduan Masyarakat, Kunker Menteri Sosial, Kunker Presiden / Wapres / Pimpinan Lembaga, dll dengan kategori kasus beragam yaitu Bansos, Bencana, Disabilitas, Kekerasan, Traficking dan kasus hukum, Pemberdayaan dan pelayanan publik, Sakit Parah, dll yang layak mendapat layanan atensi Kementerian Sosial. Pendekatan layanan atensi yang dapat berupa keluarga, komunitas atau residensial.

No	Satuan Kerja	Target PK ATENSI
1	BBPPKS Padang	2.286
2	BBPPKS Bandung	1.950
3	BBPPKS Yogya	2.150
4	BBPPKS Banjarmasin	1.600
5	BBPPKS Makassar	1.350
6	BBPPKS Jayapura	1.400
7	Poltekesos Bandung	634
8	Pusdiklatbangprof	964
9	Grand Total	12.334

Tabel Rekapitulasi Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Layanan Atensi tahun 2023

No	Satuan Kerja	Sasaran Kegiatan 3		Sasaran Kegiatan 4		Sasaran Kegiatan 5	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	BBPPKS Padang	2.286	2.555	586	639	116	126
2	BBPPKS Bandung	1.810	1.896	200	212	33	33
3	BBPPKS Yogya	1.277	1.698	771	773	188	190
4	BBPPKS Banjarmasin	665	738	900	1.018	35	38
5	BBPPKS Makassar	1.334	1.392	29	30	29	30
6	BBPPKS Jayapura	1.200	1.198	100	182	100	157
7	Poltekesos Bandung	528	528	58	58	100	100
8	Pusdiklatbangprof	786	786	36	36	203	203
9	Grand Total	9.886	10.791	2.680	2.948	804	877

Dari total target **12.334** orang terdapat peningkatan target capaian hingga **13.370** orang diseluruh BBPPKS Regional 1-6, Pusdiklatbangprof dan Poltekesos dan terdapat peningkatan capaian penerima layanan sebanyak **14.616** orang yang mendapat layanan atensi terbagi dalam 3 indikator kinerja berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasar, meningkat kemampuan menjalankan peranan sosial dan meningkat pendapatan



Pedoman Operasional Atensi 2023



SK 3

Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar

3.1 Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan

Kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang dimaksud adalah Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Korban penyalahgunaan NAPZA, ODHA, dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) berupa bantuan kebutuhan dasar. Terpenuhi kebutuhan dasar yang dimaksud adalah permakanaan, sandang, tempat tinggal sementara (asrama/wisma/ Rusun khusus), dan/atau akses layanan pendidikan/akses layanan kesehatan/dukungan aksesibilitas secara layak melalui pemanfaatan bantuan sesuai dengan hasil asesmen

Pengukuran capaian Terpenuhinya sandang dan pangan, tempat tinggal, akses kesehatan, pendidikan, dan identitas penerima pelayanan ATENSI sesuai hasil asesmen. Penghitungannya adalah jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi dengan Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan ATENSI berupa bantuan kebutuhan dasar antara lain : kebutuhan dasar keluarga, nutrisi, sembako, peralatan sekolah, peralatan memasak, obat-obatan, dll sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak bisa diakses sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 3

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi
1	BBPPKS Padang	2.286	2.555
2	BBPPKS Bandung	1.810	1.896
3	BBPPKS Yogya	1.277	1.698
4	BBPPKS Banjarmasin	665	738
5	BBPPKS Makassar	1.334	1.392
6	BBPPKS Jayapura	1.200	1.198
7	Poltekesos Bandung	528	528
8	Pusdiklatbangprof	786	786
9	Grand Total	9.886	10.791

Cluster Layanan	Jumlah PM
Rentan	5.544
Disabilitas	1.371
Lansia	2.761
Anak	1.115
Total PM	10.791



Hasil monev yang dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pusdiklatbangprof diperoleh data seluruh penerima bantuan atensi **100%** terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan atensi tahun 2023 dikarenakan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil assessment masing-masing Penerima Manfaat oleh pendamping sosial terhadap kebutuhan PM secara langsung. Data dukung dalam capaian indikator ini adalah daftar penerima bantuan By Name By Address seluruh PPKS dan KPM PKH yang dilaksanakan oleh Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung

KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN PERMASALAHAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR MELALUI PEMANFAATAN BANTUAN ATENSI

■ Terpenuhinya Kebutuhan Dasar ■ Tidak Terpenuhi kebutuhan Dasar



Program bantuan ATENSI merupakan triggering factors untuk masyarakat mendapatkan pemenuhan hak dasar mobilitas dan peningkatan nutrisi. Penerima layanan menerima Paket bantuan sebagian besar berupa paket sembako, paket perlengkapan perawatan diri, paket perlengkapan pendidikan, dan paket penambah kebutuhan nutrisi. Penerima bantuan layanan atensi antara lain Pertama, Adanya tambahan nutrisi bagi anggota keluarga, terutama anak dan lansia. Bagi PM lansia dirasakan berkurangnya pengeluaran keluarga terutama untuk pembelian kebutuhan makan dan nutrisi (kebutuhan pokok) dalam linimasa tertentu saja. Asupan gizi dirasakan meningkat, terutama dalam variasi makanan. Kedua, Bagi keluarga yang tidak memiliki pendapatan stabil atau tanpa penghasilan, bantuan dianggap membantu secara signifikan terutama bagi keluarga dengan anggota lansia. Ketiga, Atensi dalam hubungan dengan pendidikan anak, Atensi dinilai triggering factors untuk anak semangat bersekolah dengan perlengkapan pendidikan yang diterima serta membantu orang tua untuk mengurangi pengeluaran bagi pembelian peralatan sekolah dan belajar anak dan keempat, atensi dalam hubungannya dengan kesehatan keluarga

Indikator Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan	n/a	100%	100%

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan program kegiatan baru di tahun 2023. Target 2024 adalah tetap 100%

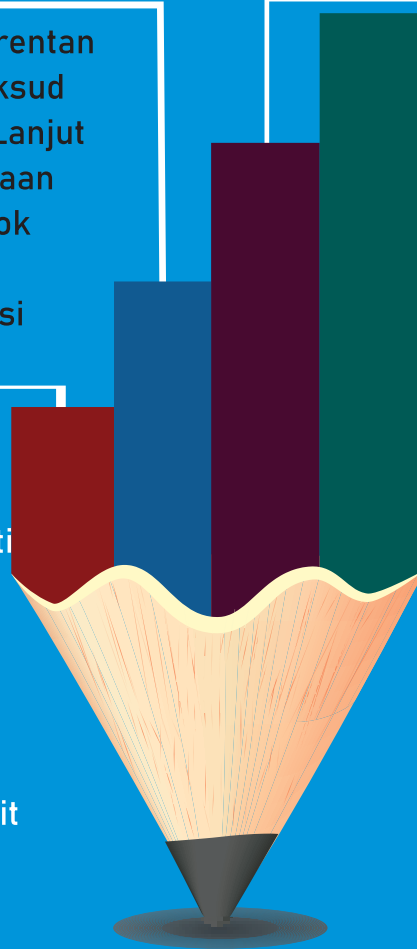
SK 4

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial

4.2 Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial

Sasaran Kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang dimaksud adalah Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Korban penyalahgunaan NAPZA, ODHA, dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI)

Bentuk layanan dan bantuan antara lain pemberian bantuan alat bantu bagi disabilitas seperti alat bantu dengar, alat bantu berjalan, cerebral palsy walker, kruk, tongkat tunanetra dan operasi katarak gratis dengan bekerjasama dengan Dinsos Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit sebagai mitra Program operasi katarak gratis Kemensos RI



Meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan PM dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial dan atau/ aktualisasi diri setelah mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas.

No	Satuan Kerja	Sasaran Kegiatan 4	
		Target	Realisasi
1	BBPPKS Padang	586	639
2	BBPPKS Bandung	200	212
3	BBPPKS Yogya	771	773
4	BBPPKS Banjarmasin	900	1.018
5	BBPPKS Makassar	29	30
6	BBPPKS Jayapura	100	182
7	Poltekesos Bandung	58	58
8	Pusdiklatbangprof	36	36
9	Grand Total	2.680	2.948

Cluster Layanan	Jumlah PM
Rentan	450
Disabilitas	765
Lansia	1.146
Anak	587
Total PM	2.948

Dalam pelaksanaan terjadi peningkatan target penerima bantuan ATENSI meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial dari sebanyak 2.680 PPKS dapat direalisasikan menjadi 2.948 PPKS atau peningkatan sekitar 110,2% dari target sebelumnya

Hasil monev yang dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pusdiklatbangprof diperoleh data **82,45%** PM telah meningkat perannya sosialnya. Dari total 376 Responden monev terdapat 310 Responden menyatakan meningkat peranan sosial

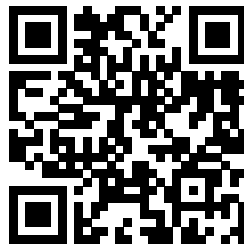
Pengukuran atensi peningkatan peranan sosial antara lain dirasakan PM yang mendapat bantuan alat bantu mobilitas contohnya membantu mobilitas PM terutama bagi Lansia dan Penyandang disabilitas dengan ketersediaan alat bantu serta adanya Peningkatan kondisi rumah sebagai fasilitas tinggal bagi keluarga (bagi penerima RST)

Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Peranan Sosial



Indikator Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	n/a	82.45%	80%

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan program kegiatan baru di tahun 2023. Target 2024 adalah tetap 80%



BNBA Atensi
Pusdiklatbangprof,
BBPPKS Regional 1-6,
Poltekesos Bandung
tahun 2023

SK 5

Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan

Sasaran Kegiatan ini diampu oleh capaian BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung.

Ketercapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya dan indikator kinerja Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	76.18%	109.08%
1	Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	80%	82.52%	107.80%



5.1 Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya

Sasaran kelompok masyarakat rentan adalah Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Korban penyalahgunaan NAPZA, ODHA, dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan

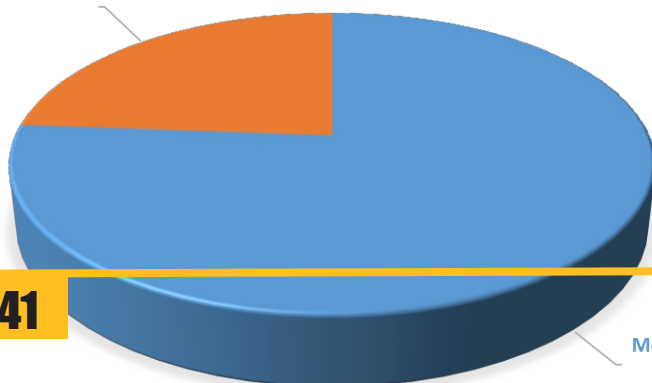
Meningkat pendapatannya yang dimaksud adalah meningkatnya pendapat penerima manfaat yang diperoleh dari pekerjaan, usaha yang dimulai, dan/atau pengembangan usaha setelah minimal 3 bulan sejak memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.

Sasaran Kegiatan 5			
No	Satuan Kerja	Target	Realisasi
1	BBPPKS Padang	116	126
2	BBPPKS Bandung	33	33
3	BBPPKS Yogya	188	190
4	BBPPKS Banjarmasin	35	38
5	BBPPKS Makassar	29	30
6	BBPPKS Jayapura	100	157
7	Poltekesos Bandung	100	100
8	Pusdiklatbangprof	203	203
9	Grand Total	804	877

Cluster Layanan	Jumlah PM
Rentan	452
Disabilitas	182
Lansia	94
Anak	149
Total PM	877

Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Meningkatkan Pendapatannya

Tidak Meningkatkan Pendapatan
96
24%



Hasil Monev Tim Monitoring dan Evaluasi Pusdiklatbangprof

diperoleh data **76,18%** PM telah meningkat pendapatan setelah menerima bantuan layanan atensi. Dari total 403 Responden sebanyak 307 responden monev menyatakan meningkat pendapatannya. Pengukuran atensi peningkatan pendapatan mendapatkan bantuan mencakup komponen kewirausahaan yaitu antara lain tambahan modal bagi yang memiliki usaha kecil

Indikator Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	n/a	76.18%	60%

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan program kegiatan baru di tahun 2023. Target 2024 adalah tetap 60%

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Atensi tahun 2023 adalah analisis terhadap capaian sasaran kinerja Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dan yang meningkat pendapatan

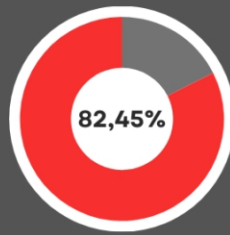
1. Adanya beberapa kasus kesenjangan antara nilai bantuan/barang yang diberikan dengan kebutuhan riil dari PM, beberapa skema bantuan dirasakan sangat kecil dibandingkan dengan kondisi kebutuhan PM
2. Intervensi bantuan dirasakan tidak merespon pada kebutuhan PM untuk mendapatkan penghasilan sehingga lebih mandiri
3. Waktu manfaat bantuan yang terbatas (karena nilai bantuan yang terbatas)
4. Belum ada assesmen khusus Kebutuhan nutrisi yang spesifik bagi penyandang disabilitas terutama anak dengan disabilitas
5. Pemberian bantuan dengan format one-off tanpa disertai assesmen kebutuhan lanjutan tidak berimplikasi signifikan terhadap kemandirian PM paska pemberian bantuan
6. Mengenai penyerahan bantuan

7. Peningkatan kapasitas kepada petugas, admin, respon kasus melalui Bimtek sehingga mampu melakukan assesment PPKS dan penetapan intervensi bantuan dengan tepat
8. Penguatan kapasitas pemerintah daerah/kab/kota dalam melakukan pendataan PPKS di wilayahnya
8. Penyediaan layanan residensial belum maksimal (tempat, layanan permakanan dan fasilitas asrama, pendampingan dan kegiatan)

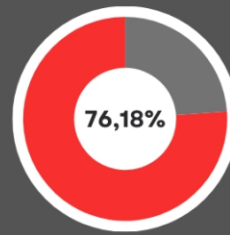
Hasil Monev Capaian Layanan ATENSI Pusdiklatbangprof 2023



Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan



Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial



Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatannya

Analisis Faktor Pendukung

1. Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos secara intensif melakukan koordinasi, bimtek kepada petugas dan admin
2. Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung dibentuk Pokja Layanan Atensi
3. Dukungan pelaksanaan layanan atensi dari Dinas Sosial Prov/Kab/Kota
4. Dukungan asistensi dari unit Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pusdatin dan Biro Perencanaan

Analisis Efisiensi

1. Pemetaan jangkauan, anggaran sekaligus SDM internal seluruh satuan kerja yang terlibat dalam layanan atensi
2. Koordinasi intensif melalui Pokja Atensi terkait komunikasi, koordinasi, penyelesaian permasalahan di lapangan, koordinasi SDM hingga update capaian setiap satker secara berkala
3. Monitoring dan evaluasi capaian layanan atensi menggunakan Monev Atensi terintegrasi pusdiklatbangprof dengan Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI

Rekomendasi

1. Pemberian bantuan diupayakan semaksimal mungkin dapat optimal mengentaskan permasalahan Penerima Manfaat.
2. Seluruh satuan kerja membuat perencanaan percepatan realisasi output dan anggaran layanan atensi
3. Membuat dan update atas semua data target dan capaian layanan ATENSI sesuai dengan kluster
4. Sinkronisasi data penerima layanan menggunakan form online yang terintegrasi dengan data SIKS CC sehingga pelaporan akan lebih cepat dan rapi sekaligus memastikan PPKS sudah masuk dalam DTKS atau mendapat tindak lanjut Pusdatin jika belum terdaftar dalam DTKS

5.2 Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya

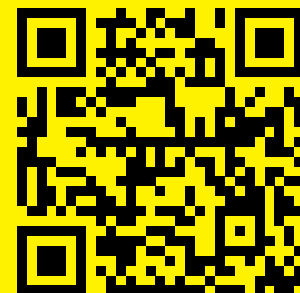
Sasaran ini berangkat dari Perpres No 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana Kemensos memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran penerima bantuan sosial. Indikator merujuk pada upaya Pusdiklatbangprof melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan vokasional kepada para penerima manfaat. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat melalui kewirausahaan sosial menjadi salah satu program utama Pusdiklatbangprof 2023

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) menjadi Program Prioritas Nasional dalam mengurangi ketimpangan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. PENA menjadi kegiatan pemberdayaan melalui pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan dan/atau menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan dampak positif secara sosial-budaya, lingkungan, khususnya untuk mewujudkan kemandirian bagi kelompok miskin, rentan, dan orang tidak mampu. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah PENA berdikari dan PENA mandatori.

Tabel Rekapitulasi Capaian Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023

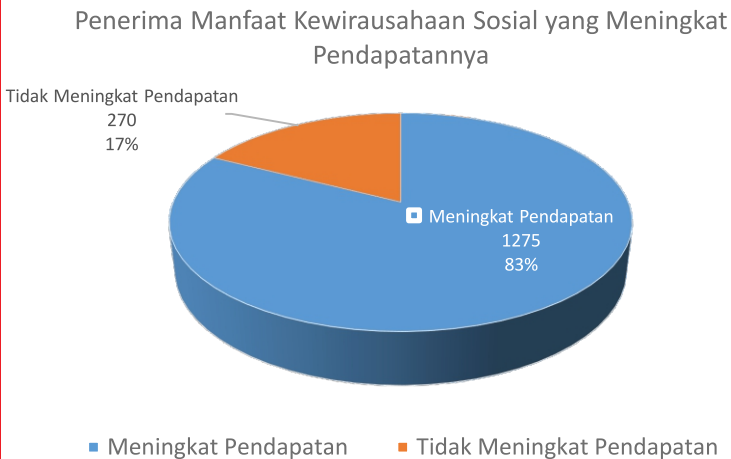
No	Satuan Kerja	Target	Target PK	Realisasi	Capaian Output	Hasil Monev
1	BBPPKS Padang	990	80%	1.083	109,39%	80,23%
2	BBPPKS Bandung	1.020		1.088	106,67%	80,70%
3	BBPPKS Yogya	1.407		1.633	116,06%	87,72%
4	BBPPKS Banjarmasin	930		1.014	109,03%	80,06%
5	BBPPKS Makassar	1.206		1.206	100,00%	81,48%
6	BBPPKS Jayapura	538		542	100,74%	81,82%
7	Pusdiklatbangprof/Total	6.091		6.566	107,80%	82,52%

Hasil Capaian Output dari 6.091 target yang telah ditetapkan terdapat capaian akhir sebanyak 6.566 orang menerima bantuan kewirausahaan melalui program PENA yang merupakan capaian seluruh BBPPKS regional 1-6.

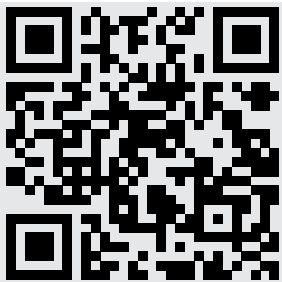


**Pedoman
Pelatihan
Dayamas
2023**

Hasil moneyv Tim Monitoring dan Evaluasi Pusdiklatbangprof diperoleh data **82,52%** PM telah meningkat pendapatan setelah menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat. Dari total 1.545 Responden moneyv sebanyak 1.275 responden menyatakan meningkat pendapatannya



Sumber Data yang digunakan adalah hasil Monitoring dan Evaluasi (Moneyv) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. Responden yang dimoneyv adalah Penerima Manfaat Pelatihan PENA 2022 dan Pelatihan PENA Berdikari 2023 yang setidaknya sudah tiga bulan menerima program. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah program) dan Penghasilan Bersih/Keuntungan usaha (sebelum dan sesudah menerima program). Disimpulkan meningkat pendapatannya jika salah satu antara Pendapatan Usaha/omset atau Pendapatan Bersih/keuntungan ada yang meningkat/naik.



Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dayamas tahun 2023

Indikator Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	n/a	82.52%	80%

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan program kegiatan baru di tahun 2023. Target 2024 adalah tetap 80%

Pagu Anggaran 34,762,756,000
 Realisasi Anggaran 33,711,784,275
 Sisa Anggaran 1,050,971,725
 Persentase 96.98





WORKSHOP PENA

Pelatihan Penguatan Kapasitas Daya Saing KPM PENA
Pelatihan Penguatan Kapasitas Daya Saing KPM PENA

Analisis Faktor Pendukung

1. Koordinasi Pelaksanaan pelatihan PENA Berdikari dan Mandatori dengan Dir Dayasos, Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Dinas Sosial Kab/Kota
2. Data BNBA KPM Berdikari dari Dir Perlinjamsos dan data KPM Mandatory hasil penjangkauan sesuai kebutuhan program
3. Jenis bantuan yang diterima KPM/PPKS sesuai dengan hasil assessment kepada penerima manfaat sehingga dipastikan sesuai kebutuhan serta mendukung pemenuhan serta kebutuhan PM

Analisis Efisiensi

1. Tim Pokja Pusdiklat dan BBPPKS Regional 1-6 koordinasi secara continue sehingga mampu mengantisipasi beberapa permasalahan teknis yang muncul untuk diambil jalan keluar
2. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Pusdiklatbangprof
3. Pelatihan secara daring melalui Pena TV dan klinik usaha PENA memperlus akses yang mendukung materi kewirausahaan bagi penerima manfaat

Rekomendasi

1. Monitoring Evaluasi pelaksanaan pelatihan PENA secara sistematis, berkala dan terintegrasi dengan unit teknis terkait
2. Pedoman umum memuat ketentuan jenis bantuan yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan salah satunya terkait pengenaan pajak pada pembelian barang bantuan masyarakat
3. Pelatihan cluster usaha harus mampu lebih menjawab kebutuhan rintisan usaha penerima manfaat
4. Intervensi lanjutan setelah pelatihan dan pemberian sarana pendukung
5. Klinik usaha pena diperluas/memperbanyak intervensi pelatihan dan pemberian sarana pendukung pasca diklat
6. Kemensos menjembatani akses para wirausaha ke Askes modal usaha, ijin dan untuk memperluas pemasaran usaha

SK 6

Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik, mendukung terwujudnya Kementerian Sosial yang akuntabel, kapabel dengan pelayanan prima kepada masyarakat. Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof dan Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Nilai akuntabilitas kinerja	80	80.03
2	Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof	91	90.335



Laporan Kinerja
Pusdiklatbangprof
tahun 2022

6.1 Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof

Tabel Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof tahun 2022

Komponen Indikator	Nilai Tertinggi	Nilai
Perencanaan Kinerja	15	12,63
Pengukuran Kinerja	12,5	9,71
Pelaporan Kinerja	35	28,01
Total	35	28,01
Predikat	Memuaskan	80,03 (A)

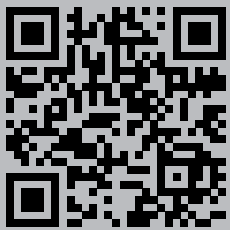
Akuntabilitas kinerja menunjukkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dimulai perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, pencapaian kinerja serta berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi



Indikator Kegiatan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof	66.10%	71.80 (BB)	80.03 (A)	n/a	80

Penyusunan dokumen SAKIP 2023 mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang menjadi rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen SAKIP 2022

Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP Pusdiklatbangprof tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menyatakan bahwa Pusdiklatbangprof dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator dengan beberapa penyampaian kelemahan atas Implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Pusdiklatbangprof yang sudah dilakukan perbaikan dalam penyusunan LAKIN Pusdiklatbangprof tahun 2023.



LHE AKIP
Pusdiklatbangprof
Tahun 2022

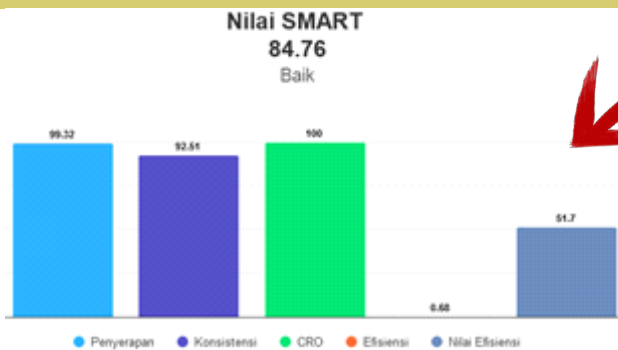
6.2 Nilai Kinerja Anggaran Pusdiklatbangprof

Evaluasi kinerja anggaran merupakan rangkaian proses yang mencakup pengukuran, penilaian dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran dapat berupa capaian output kegiatan dan capaian/realisasi anggaran. Aktivitas pada proses evaluasi (kinerja anggaran) mencakup pengukuran, penilaian dan analisis kinerja yang diperoleh berdasarkan penilaian dan pengukuran IKPA Pusdiklatbangprof tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrument penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yang penilaiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART) dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan RI melalui pemantauan IKPA dalam aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Nilai kinerja anggaran diperoleh berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan dengan menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan :

1. Nilai Evaluasi Anggaran pada Aplikasi SMART 50%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 50%



Berdasarkan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dalam Aplikasi SMART per 31 Desember 2023 diperoleh hasil nilai SMART Pusdiklatbangprof tahun 2023 adalah 84,76 dengan predikat Baik

Nilai SMART

Kriteria EKA dalam SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tuisi kerja berupa keluaran (output) dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kualitas dan kuantitas terukur. Evaluasi kinerja anggaran SMART secara regular meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Variabel yang ukur pada implementasi antara lain capaian keluaran (program dan kegiatan), penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran pada perencanaan.

Nilai IKPA

IKPA adalah nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Indikator IKPA mencakup 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam 8

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
3	182	027	690549	PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI	Nilai	100.00	68.71	99.65	96.64	100.00	94.43	100.00	100.00	95.91	100%	95.91
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.87	19.93	9.66	10.00	9.44	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.36		98.14					100.00			

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dalam Aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2023 diperoleh nilai IKPA Pusdiklatbangprof tahun 2023 adalah 95,91

Berdasarkan ketentuan penghitungan total Nilai Kinerja Anggaran dengan sistem pembobotan Nilai Aplikasi SMART 50% dan Nilai IKPA 50% diperoleh hasil total $(84,76 \times 50\%) + (95,91 \times 50\%) = 42,380 + 47,955 = 90,335$.

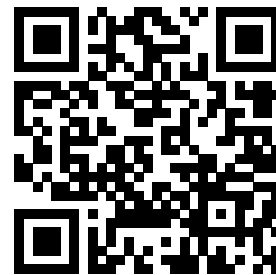
Indikator Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof		IKPA : 89,38 SMART : -	IKPA : 95.91 SMART : 84.76	90

Nilai ini dibawah target capaian tahun 2023 yaitu 91 dikarenakan salah satu faktor tidak melakukan Revisi Halaman III DIPA secara berkala. Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022. Pusdiklatbangprof memiliki capaian IKPA sebesar 89.38 di tahun 2022 dan meningkat 6,53, sedangkan untuk tahun 2022 tidak mencantumkan nilai SMART sehingga capaian nilai SMART tahun 2023 84,76 tidak bisa dibandingkan.

SK 7 **Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof**

7.1 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan baik pada level internal Pusdiklatbangprof atau kepada mitra



Laporan SKM Pusdiklatbangprof 2023

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof	90	90.11

eksternal. Nilai Kepuasan Stakeholder didapatkan dari survey kepuasan stake holder Pusdiklatbangprof

Survei Kepuasan Masyarakat Pusdiklatbangprof dalam Pelayanan Publik Tahun 2023 adalah laporan tahunan Desember 2023 sebagai bentuk pengukuran kepuasan penerima layanan Pusdiklatbangprof periode Januari-Desember 2023 berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pusdiklatbangprof melakukan distribusi kuesioner melalui google form kepada tim kelompok kerja terhadap penerima layanan. Total responden 132 orang yang melakukan penilaian terhadap layanan Pusdiklatbangprof antara lain pelatihan/diklat, sertifikasi, akreditasi, Jabfung Peksos, Jabfung Peksos, ATENSI, pendidikan tugas belajar.

Tabel Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pusdiklatbangprof tahun 2023

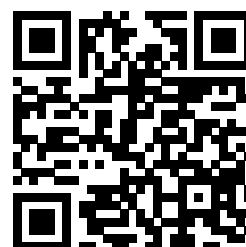
No	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Predikat
1	Indeks Persyaratan Pelayanan	93	A - Sangat Baik
2	Indeks Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	92	A - Sangat Baik
3	Indeks Waktu Penyelesaian Pelayanan	92.5	A - Sangat Baik
4	Indeks Biaya atau Tarif Pelayanan	92.75	A - Sangat Baik
5	Indeks Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92.25	A - Sangat Baik
6	Indeks Kompetensi Pelaksana Pelayanan	90.25	A - Sangat Baik
7	Indeks Perilaku Pelaksana Pelayanan	90.75	A - Sangat Baik
8	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan	92.50	A - Sangat Baik
9	Indeks Keamanan Pelayanan	93	A - Sangat Baik
	Total Nilai	829	
	Nilai SKM Pusdiklatbangprof tahun 2023	92.11	A - Sangat Baik

Tabel Hasil Pembobotan Nilai SKM Pusdiklatbangprof BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung tahun 2023

No	Satuan Kerja	IKM	Responden	Bobot
1	BBPPKS Padang	96.53	412	39,770.36
2	BBPPKS Bandung	92.31	633	58,432.23
3	BBPPKS Yogya	91.04	420	38,236.80
4	BBPPKS Banjarmasin	90.69	616	50,285.96
5	BBPPKS Makassar	91.08	62	55,865.04
6	BBPPKS Jayapura	90.28	557	5,646.96
7	Poltekesos Bandung	90.03	450	40,513.50
8	Pusdiklatbangprof	92.11	134	12,342.74
9	Total Gabungan		4,598	91.69

Biro Humas melakukan penggabungan penilaian SKM Pusdiklatbangprof dengan seluruh BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung dan menjadi nilai SKM Pusdiklatbangprof yang dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dengan nilai total

91.69

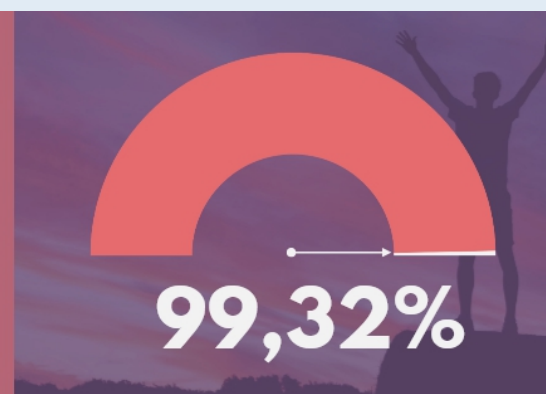
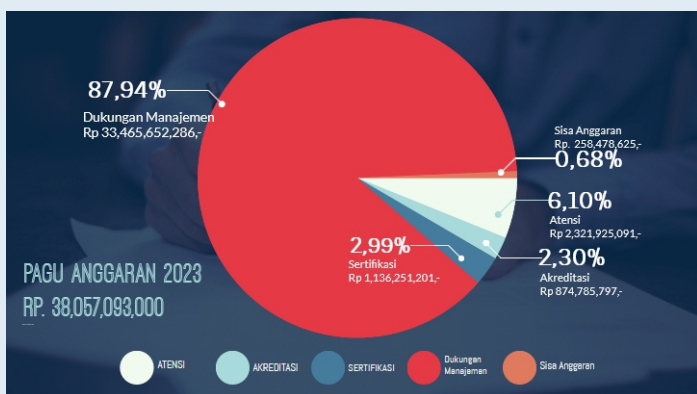


Konversi SKM Pusdiklat, BBPPKS, Poltekesos

Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof 2023

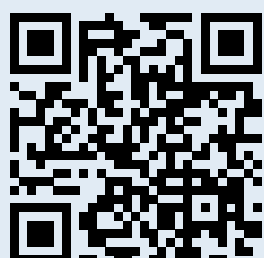
Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof Tahun 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Capaian
Belanja Pegawai	12,878,520,000	12,751,454,321	127,065,679	99.01%
Belanja Barang	25,178,573,000	25,047,160,054	131,412,946	99.48%
Total Anggaran 2023	38,057,093,000	37,798,614,375	258,478,625	99.32%

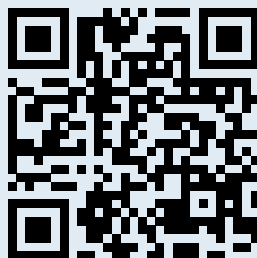


Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof Tahun 2023 per Jenis Kegiatan

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Atensi	2,336,599,000	2,321,925,091	14,673,909	99.37%
Akreditasi	875,000,000	874,785,797	214,203	99.98%
Sertifikasi	1,137,000,000	1,136,251,201	748,799	99.93%
Dukman	33,708,494,000	33,465,652,286	242,841,714	99.28%
Total	38,057,093,000	37,798,614,375	258,478,625	99.32%



Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof tahun 2023



Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos tahun 2023

Realisasi Anggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung per 31 Desember 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Pelatihan Dayamas	34,762,756,000	33,711,784,275	1,050,971,725	96.98%
Atensi	37,390,832,000	36,765,691,912	625,140,088	98.33%
Akreditasi	6,669,527,000	6,609,657,804	59,869,196	99.10%
Sertifikasi	11,063,286,000	10,833,023,947	230,262,053	97.92%
Dukman	155,204,664,000	152,386,980,639	2,817,683,361	98.18%
Pendidikan Tinggi Poltekesos	12,590,016,000	12,143,837,847	446,178,153	96.46%
Total Anggaran	257,681,081,000	252,450,976,424	5,230,104,576	97.97%



Analisis Efisiensi Pusdiklatbangprof Tahun 2023

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang ditetapkan, secara umum Pusdiklatbangprof telah **"efisien"** dalam penggunaan anggaran.

Realisasi kinerja lebih tinggi dari target capaian sasaran kegiatan dengan penggunaan anggaran seluruh sasaran kegiatan diatas 95% sudah sesuai dengan perencanaan anggaran dan pencapaian target sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklatbangprof 2023

1. Data Realisasi Anggaran Kegiatan Akreditasi, Sertifikasi SDM Kesos, Layanan Atensi, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan total anggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung karena pencapaian PK kegiatan merupakan gabungan dari capaian seluruh satuan kerja Pusdiklatbangprof, BBPPKS regional 1-6 dan Poltekesos Bandung.
2. Data realisasi anggaran Alumni Poltekesos yang bekerja di bidangnya diperoleh dari capaian Poltekesos Bandung.
3. Data Realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen menggunakan anggaran internal Pusdiklatbangprof tahun 2023



Analisis Efisiensi

Pusdiklatbangprof Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Kinerja	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	80,43%	99,10%
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	82%	95,40%	97,92%
	Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya	82%	82,83%	100%
	Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	85%	90,31%	99,67%
Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan	100%	100%	
Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	80%	82,45%	98,33%
Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	76,18%	
	Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	80%	82,52%	96,98%
Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklatbangprof yang Berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof	80	80,03	99,90%
	Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof	91	90,33	99,34%
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusdiklatbangprof	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof	90	92,11	99,94%

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja PK Pusdiklatbangprof tahun 2023

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	6.669.527.000	6.609.657.804	99,10%
Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	11.063.286.000	10.833.023.947	97,92%
Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnyanya	451.230.000	451.230.000	100%
Persentase (%) SDM Kesos yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan kinerja baik	7.108.584.000	7.084.885.869	99,67%
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan			
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial	37,390,832,000	36,765,691,912	98,33%
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya			
Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya	34,762,756,000	33,711,784,275	96,98%
Nilai akuntabilitas kinerja Pusdiklatbangprof	1.732.560.000	1.730.773.038	99,90%
Nilai kinerja anggaran Pusdiklatbangprof	22.451.974.000	22.302.888.379	99,34%
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof	2.193.373.000	2.192.118.190	99,94%
Pagu dan Realisasi Kegiatan Akreditasi LKS, Sertifikasi SDM Kesos dan Layanan Atensi menggunakan anggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6 dan Poltekesos Bandung	Pagu dan Realisasi Alumni Poltekesos Bekerja di Bidangnyanya menggunakan anggaran Poltekesos Bandung		
Pagu dan Realisasi Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan anggaran Pusdiklatbangprof dan BBPPKS Regional 1-6	Pagu dan Realisasi Kegiatan terkait indikator diklat kinerja baik, akuntabilitas kinerja, kinerja anggaran dan nilai kepuasan layanan Pusdiklatbangprof a di Bidangnyanya menggunakan anggaran Pusdiklatbangprof		

04 PENUTUP



KESIMPULAN

01

Terdapat 7 Sasaran Kegiatan yang diukur melalui 12 Indikator Kinerja dengan hasil 10 capaian melebihi target indikator kinerja, 1 capaian sama dengan target indikator kinerja dan 1 capaian kurang dari target indikator kinerja.

02

Hingga laporan ini dibuat terdapat masih terdapat 1 indikator yang nilainya belum didapatkan karena hasilnya belum disampaikan oleh K/L yang berwenang sehingga menggunakan hasil tahun sebelumnya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof 2023

03

Dari total anggaran 38.057.093.000 realisasi sebesar 37.798.614.375 atau realisasi sebesar 99,32% lebih baik dari capaian realisasi tahun 2022 sebesar 67,95%

04

Koordinasi yang lebih intensif dalam kerangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan ntegrasi dengan stakeholder dan unit teknis terkait lainnya baik dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi program/lkegiatan

05

Perlunya sistem digitalisasi dalam beberapa program layanan sehingga bisa meningkatkan standar pelayanan sekaligus monitong hasil capaian program layanan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan secara langsung

06

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan terstandar sesuai dengan kondisi kegiatan serta dapat dimanfaatkan bagi pengembangan program dimasa yang akan datang



REKOMENDASI

1

Penguatan komunikasi internal antara Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional 1-6, Poltekesos Bandung dan Unit Teknis Terkait berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan

2

Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan efisien

3

Pemantauan capaian kinerja dan rencana aksi secara berkala, melibatkan koordinasi unit teknis terkait jika terdapat capaian indikator kinerja yang bersinggungan dengan capaian kinerja Unit Teknis terkait

4

Peningkatkan sinergitas kerjasama dalam bentuk koordinasi, pemanfaatan data program hingga sinkronisasi hasil capaian dengan stakeholder terkait

5

Peningkatan langkah strategis terhadap program/kegiatan dalam bentuk kebijakan pimpinan, teknis pelaksanaan kegiatan yang sifatnya program baru, mandatory dan melibatkan koordinasi unit teknis terkait

6

Meningkatkan kualitas layanan, review dan monitoring evaluasi secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan

7

Meningkatkan sistem berbasis digital pelaksanaan berbagai program di lingkungan Pusdiklatbangprof

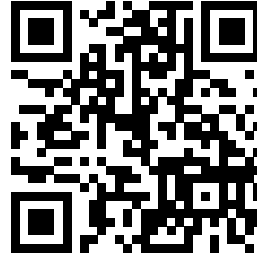
8

Banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan Pendamping Sosial maka diperlukan Penguatan Kapasitas Pendamping sosial dalam rangka penguatan capaian hasil program/kegiatan

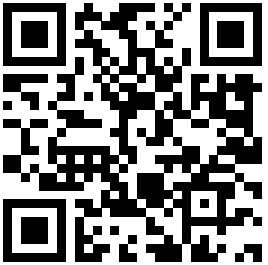
LAMPIRAN



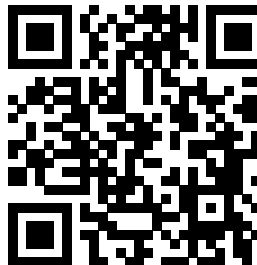
**IKU Pusdiklatbangprof
tahun 2023**



**Pohon Kinerja
Pusdiklatkesos 2023**



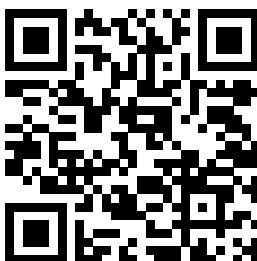
**Renja Pusdiklatbangprof
tahun 2023**



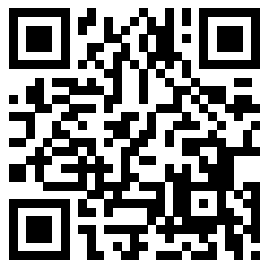
**Pedoman Teknis
Perencanaan**



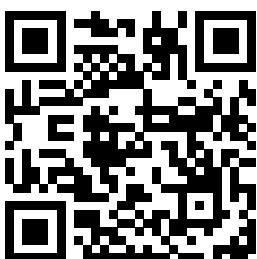
**Perjanjian Kinerja
Kapusdiklatbangprof
tahun 2023**



**Tindak Lanjut LHE
AKIP Internal
Pusdiklatbangprof
2022**



**RKA Awal dan RKA Akhir
Pusdiklatbangprof tahun
2023**



**Hasil Monev Rencana
Aksi Pusdiklatbangprof
tahun 2023**



**DPA Pusdiklatbangprof
tahun 2023**

